

Dr. A. Razak, SE, MM, Ak
Dr. Elyta, S.Sos, M.Si



EKONOMI POLITIK

Antara Teori dan Praktek

Dr. A. Razak, SE, MM,Ak
Dr. Elyta, S.Sos,M.Si

EKONOMI POLITIK

Antara Teori dan Praktek



EKONOMI POLITIK Antara
Teori dan Praktek
All rights reserved @2018, Indonesia: Pontianak

Dr.A. Razak, SE, MM,Ak
Dr. Elyta, S.Sos,M.Si

Layout & Cover:
FAHMI ICHWAN

Publisher Top Indonesia
Top Indonesia Jalan Purnama Agung VII Pondok Agung Permata Y35
Pontianak Kalimantan Barat

Cetakan Pertama, Desember 2018

xii +150 Page : 15 cm x 23 cm

ISBN ; 978-602-5720-18-5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

*Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura*

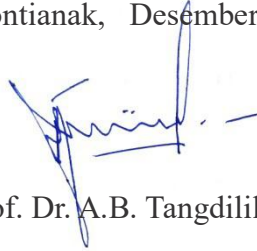
Saat ini ilmu ekonomi politik menjadi satu di antara cabang ilmu yang perkembangannya cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ilmu ekonomi politik ialah cabang studi yang bersifat multidisiplin dan membutuhkan kontribusi dari ilmu-ilmu lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Isu ekonomi politik sering menjadi sorotan kritis terutama dihubungkan dengan negara maupun masyarakat.

Kepada penulis saya sampaikan penghargaan atas tulisannya yang telah berhasil menulis buku *Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek*, buku adalah media pembelajaran cetak yang diterbitkan penerbit yang merupakan anggota IKAPI berguna untuk memudahkan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensinya. Penulis telah mengemas-ulang dengan cara memanfaatkan buku-buku, koran dan informasi lain yang berkaitan dengan ilmu politik.

Menurut saya dengan memahami teori, uraian dan metode dari buku ekonomi politik ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang holistik. Selanjutnya buku ini menerapkan metode pembelajaran aktif di mana mahasiswa juga diharapkan keaktifannya dalam proses pembelajaran sehingga tidak hanya dosen yang aktif. Keaktifan tersebut diwujudkan pula lewat interaksi antara dosen dengan mahasiswa serta antar mahasiswa.

Akhir kata saya ucapkan selamat kepada mahasiswa untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu bahan bacaan, semoga bermanfaat.

Pontianak, Desember 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A

Pengantar

Penulis bersyukur kepada Allah SWT dan memanjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah memberi ridho dan nikmat-Nya menyebabkan tim penulis bisa menyelesaikan buku yang sekarang berada ditangan pembaca. Buku ini dibuat dengan pertimbangan menyediakan buku bagi mahasiswa yang berkompeten tentang ekonomi politik hal inilah yang memotivasi penulisan buku ini. Penyediaan literatur pokok semacam ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman tentang dasar-dasar ilmu politik. Buku ini adalah buku yang dimaksudkan untuk menjadi materi pembelajaran bagi para mahasiswa dalam mata kuliah ekonomi politik, tetapi juga diharapkan akan menarik minat para politisi maupun pihak-pihak yang berminat menekuni bidang politik untuk membacanya.

Namun, terlepas dari kesenjangan kelembagaan yang mencolok dan kontradiksi fungsional, antagonisme politik dan kepentingan ekonomi komunitas yang tidak dapat didamaikan masih tetap menjadi faktor pembatas utama untuk kemajuan yang lebih menentukan dan efektif di bidang ini.

Pembahasan dimulai dengan tinjauan mata kuliah,

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari Definisi ekonomi politik dan pendekatan ekonomi politik terhadap hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Bab II Hubungan Ekonomi Politik terdiri dari relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik dan unsur ekonomi dalam politik.

Bab III Teori Dalam Ekonomi Politik mengenai teori dalam melihat ekonomi politik.

Bab IV Negara Dan Ekonomi Politik terdiri dari implikasi ekonomi politik terhadap negara, perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi, perubahan struktur dan ekonomi global, dan pemahaman politik dalam ekonomi.

Bab V Pembagian Isu Ekonomi Politik terdiri dari isu dan contoh kasus dalam ekonomi politik, isu bisnis dalam ekonomi politik.

Bab VI Politik Pemberdayaan Dan Inkubator Bisnis Untuk Meningkatkan Ekonomi Politik Pada Wira Usaha terdiri dari Politik Pemberdayaan dan Inkubator Bisnis.

Bab VII Ekonomi Politik dalam Pendekatan Internasional, pemahaman ekonomi politik dari pendekatan internasional dan isu kawasan.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua penulis baik dari buku-buku dan materi di web internet yang telah penulis jadikan rujukan terhadap proses penulisan buku ini, sehingga buku ini bisa terbit. Harapan kami, buku ini bisa memberi manfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik.

Pontianak, Desember 2018

Dr.A. Razak, Se, MM,Ak

Dr. Elyta S.Sos, M.Si

(vi)

()

TINJAUAN MATA KULIAH

1. Deskripsi Mata Kuliah

Membahas pengertian ekonomi politik ekonomi politik secara umum dan hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik serta implikasi teoritisnya dalam memahami menganalisis ekonomi politik .

2. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Ekonomi Politik

3. Tujuan Instruksional Khusus

- a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi ekonomi politik
- b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan hubungan ekonomi politik terdiri dari relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik dan unsur ekonomi dalam politik.
- c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan teori dalam ekonomi politik mengenai teori dalam melihat ekonomi politik
- d. Mahasiswa mampu mendeskripsikan negara dan ekonomi politik terdiri dari implikasi ekonomi politik terhadap negara, perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi, perubahan struktur dan ekonomi global, dan pemahaman politik dalam ekonomi.
- e. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pembagian isu ekonomi politik terdiri dari isu dan contoh kasus dalam ekonomi politik, isu bisnis dalam ekonomi politik.

(vii)

()

-
- f. Mahasiswa mampu mendeskripsikan politik pemberdayaan dan inkubator bisnis untuk meningkatkan ekonomi politik pada wira usaha terdiri dari politik pemberdayaan dan inkubator bisnis.
 - g. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ekonomi politik dalam pendekatan internasional, pemahaman ekonomi politik dari pendekatan internasional dan isu kawasan.

5. Materi Kegiatan Perkuliahan

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK
3. BAB III TEORI DALAM EKONOMI POLITIK
4. BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK
5. BAB V ISU EKONOMI POLITIK
6. BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA
7. BAB VII EKONOMI POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 . Definisi Ekonomi Politik	2
1.2 . Pendekatan Ekonomi Politik	7
1.2.1. Pendekatan Ekonomi	7
1.2.2. Pendekatan Politik	9
Rangkuman	13
Pertanyaan Kunci/Tugas	14
Formulir Nomor 1	15
Formulir Nomor 2	16
Daftar Pustaka	18
BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK	19
2.1. Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik	20
2.2. Unsur Ekonommi dalam Politik	24
Rangkuman	28
Pertanyaan Kunci/Tugas	29
Formulir Nomor 1	30
Formulir Nomor 2	31
Daftar Pustaka	33

BAB III TEORI DALAM EKONOMI POLITIK	35
3.1. Teori-Teori Dalam Ekonomi Politik	36
3.1.1. Unsur Politik	36
3.1.2. Studi Komparatif dengan Sistem Politik	37
3.2. Teori Dependencia	38
Rangkuman	45
Pertanyaan Kunci/Tugas	46
Formulir Nomor 1	47
Formulir Nomor 2	48
Daftar Pustaka	50
BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK	51
4.1. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara	52
4.2. Perkembangan hubungan Negara dengan Masyarakat di Bidang Perekonomian	58
4.3. Perubahan Struktur Ekonomi Global dan Nasional	58
Rangkuman	68
Pertanyaan Kunci/Tugas	70
Formulir Nomor 1	71
Formulir Nomor 2	72
Daftar Pustaka	74
BAB V ISU EKONOMI POLITIK	77
5.1. Isu Ekonomi Politk	78
5.1.1. Kelemahan Implementasi	82
5.1.2. Tantangan Tata Kelola Timah	83
5.2. Isu Bisnis Dalam Ekonomi Politik	85
5.2.1. Pergulatan Bisnis Politik Indonesia	90
Rangkuman	99
Pertanyaan Kunci/Tugas	100
Formulir Nomor 1	101
Formulir Nomor 2	103
Daftar Pustaka	105

BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA	107
6.1. Politik Pemberdayaan	108
6.2. Inkubator Bisnis	114
Rangkuman	119
Pertanyaan Kunci/Tugas	120
Formulir Nomor 1	120
Formulir Nomor 2	121
Daftar Pustaka	122
BAB VII EKONOMI POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL	125
7.1. Ekonomi Dalam Politik Internasional	126
7.2. Ekonomi Polirik dalam Isu Kawasan	132
Rangkuman	135
Pertanyaan Kunci/Tugas	137
Formulir Nomor 1	138
Formulir Nomor 2	140
Daftar Pustaka	142
GLOSARIUM	145
INDEKS	149

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memperoleh gambaran tentang definisi ekonomi politik
2. Memperoleh gambaran tentang pendekatan ekonomi politik

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang definisi ekonomi politik dan pendekatan dalam ekonomi politik.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab I dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

1.1. Definisi Ekonomi Politik

Negara-negara maju sudah sejak lama mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat, faktanya pada masa perang dunia kedua ada beberapa negara bagian yang tergolong miskin hingga dikatakan sebagai negara berkembang serta menimbulkan berbagai pertanyaan fundamental (Sukirno, 2001). Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan bagaimana negara yang dapat menyejahterakan masyarakatnya dan bagaimana kondisi perekonomian pada masa itu, pada masa perang tersebutlah dunia seolah disadarkan bahwa alat untu meraih kesuksesan ialah menjamin kehidupan masyarakatnya dengan memajukan sektor perekonomian yang dengan begitu akan mempermudah memperoleh kendali politik.

Ekonomi Politik berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti Kota atau unit politik dan merujuk ke *policy* (Kebijakan) dan dijelaskan sebagai manajemen dalam rumah tangga atau dikenal dengan *oikonomike* Searah dengan pendapat tersebut, Adam Smith (1729-1790) seorang ahli ekonomi politik Inggris telah memberikan berbagai pemahaman tentang ekonomi terdahulu (Lane, 1994:XI). Dengan demikian pemikiran tersebut telah menyumbang pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan dan mendefinisikan mengenai ekonomi klasik memuat teori dari suatu pemikiran bebas serta keterkaitannya dengan neoliberal. Adanya keterkaitan dan sinergitas pembangunan dan kebijakan sebagai penggerak yang menyebabkan tumbuhnya sektor ekonomi dan salah satu cara mencapainya juga didapat dari adanya perdagangan bebas.

Tulisan mengenai pemikiran pemikiran ekonomi yang menggambarkan dukungan terhadap persaingan globalisasi serta pasar bebas dan aktif seperti yang dicetus hal tersebut dianggap

sebuah kemajuan dalam ekonomi politik yang akhirnya tidak mempermasalahkan aset pribadi adalah anggapan salah. Anggapan tersebut karena menutupi fakta bahwa pemikiran Kapitalisme yang ada didalam pemikiran tersebut berpotensi menjadi kejahatan sosial maupun ekonomi di era 3,5 dekade nantinya.

Menurut Marx (1994) mengajukan Kritik terhadap pemikiran ekonomi baru tersebut yang tertuang “*Contribution to a Critique of Political Economy* Ekonomi politik merupakan sebuah ilmu yang hadir seiring dengan orang-orang yang memiliki modal sendiri, sebab sifat pemberdayaan dari sistem – sistem sebelum adanya kaum kapitalis adalah terbuka. Mereka tidak memerlukan suatu ilmu untuk menjabarkan mereka sendiri. Melegitimasi mereka hanya memerlukan ideologi tetapi cara berpikir pemberdayaan kapitalis tidak terbuka, memerlukan ilmu ekonomi untuk mengungkapkannya

Berdasarkan pendapat tersebut Perkembangan ekonomi baru ditengah-tengah perekonomian dunia dapat mengarah pada terbentuknya kapitalisma yang berujung persaingan sosial maupun ekonomi dengan cara-cara yang tidak sehat. Penggunaanya tidak menyalahi pelaksanaan yang seharusnya atau umum namun hanya menimbulkan adanya perubahan makna. Diidentifikasi keterlibatan aspek produksi, keuangan, hingga perdagangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada kasus-kasus keuangan, pendapatan negara, dan seputar perdagangan. Semua faktor tersebut menunjukkan peran utama manusia dalam ekonomi politik sebagai masyarakat. Namun, terlepas dari kesenjangan kelembagaan yang mencolok dan kontradiksi fungsional, antagonisme politik dan kepentingan ekonomi komunitas yang tidak dapat didamaikan masih tetap menjadi faktor pembatas utama untuk kemajuan yang lebih menentukan dan efektif di bidang ini.

Suatu negara yang menjalankan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan merupakan totalitas interaksi antar manusia. McIver (dalam Budiardjo, 2008:46) menyatakan warga negara adalah pola interaksi yang sistematis.

Pendapat lainnya juga mengemukakan bahwa berkembangnya perekonomian dalam Negara yang banyak melibatkan lembaga keuangan dari luar negeri dan dalam negeri seperti perusahaan yang dipengaruhi pemahaman neoliberalisme (Deliarnov, 2006:2). Turut sertanya negara juga berperan penting dalam asal usul munculnya ekonomi politik, negara tersebut memuat unsur ekonomi dan politik didalamnya sehingga apa yang disebut ekonomi politik terus melekat dan berkembang seiring kemajuan peradaban dunia dan berkembangnya suatu negara.

Kaitan mengenai ekonomi dan politik juga dapat di artikan kedalam sebuah susunan yang terdiri dari unsur analisis dalam politik dan ekonomi, dimana unsur-unsur tersebut saling memberikan pengaruhnya. Pemahaman mengenai Ekonomi Politik sendiri sudah lama di Indonesia. Munculnya ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu bahwallmu politik dan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi suatu karya dari teori-teori ekonomi politik baru. Apabila di tinjau dari bentuk ekonomi politik baru bahwa perpisahan antara ekonomi politik karena para pakar sebelumnya terlalu berfokus pada transaksi dan penataan nonpasar. Sedangkan konsep bukan pasar digunakan untuk menganalisis kebijakan umum.

Dari definisi tersebut penggerak yang sesungguhnya ialah manusia didalam sejarah kemunculan ekonomi politik tersebut, berbagai pandangan yang mengaitkan peran manusia dengan kemunculan ekonomi politik. Karena itu, ekonomi tidak terlepas

dari perilaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam merumuskan dan menjalankan suatu sistem ekonomi politik membutuhkan adanya kerjasama dan sosialisasi yakni dengan melakukan konteks sosial mencakup masyarakat tanpa dominasi yang mengarah pada perilaku monopoli. Dengan begitu, maka dapat dicapainya keselarasan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan ekonomi politik.

Bentuk kemajuan dalam kehidupan masyarakat dilihat berdasarkan perilaku ekonomi dalam hal produksi, pemikiran yang biasa saja akan menghasilkan penerapan yang biasa saja (Khalidun dan Rahman, 2008). Hal ini menyebabkan munculnya suatu dekadensi moral terhadap penduduk kota dan penduduk desa yang memiliki pola pemikiran berbeda, masyarakat kota cenderung memiliki standar hidup lebih tinggi sementara penduduk desa cenderung lebih sederhana sehingga memunculkan ruang antara masyarakat kota dan desa.

Konflik antar kelas manusia diawali dengan pertikaian akibat perilaku ekonomi, yakni kelas sosial yang berasal dari kekuasaan alat dalam berbisnis Struktur tingkatan maupun kekuasaan harus lebih politis, selain itu pemikirannya mengenai sistem ekonomi politik lebih luas dibanding dengan sosialis. Dalam tulisannya, perkembangan manusia itu dalam deterministik yang sulit dihindari masyarakat dunia (Marx, 1994:66-68).

Tingkatan sosial yang dimaksud pada masyarakat kota, karakter kritis dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi merupakan ciri masyarakatnya. Tingkatan ekonomi dibentuk yang didasarkan pada tingkatan pendidikan secara sengaja dengan berdasarkan kepemilikan harta benda. Perbedaan masyarakat kedalam kelas-

kelas dan dirancang untuk mencapai target kebutuhan kerja khususnya bidang ekonomi. Adaun kelas yang dimaksud dibedakan berdasarkan ekonomi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu kelas Atasbagi pelaku usaha, pejabat. Kelas menengah untuk para pegawai biasa, dan terakhir kelas bawah ditunjukkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai supir becak, buruh, dll. .

Ekonomi sebagai struktur yang mendasari perbandingan dalam masyarakat atau penduduk (Marx, 1994). Manusia sulit di pisahkan dari sisi material, artinya perilaku yang setidaknya radikal dalam diri manusia tersebut berasal dari kebutuhan ekonomi mencakup sandang, pangan , papan. Kebutuhan ini memicu manusia untuk membuat karya dan produksi ekonomi, produk dan fasilitas memiliki implikasi nyata dalam pengembangan ekonomi politik. Hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok tertentu mendukung terbentuknya sistem pemerintahan dan kebijakan negara dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik.

Barang dan jasa sebagai dampak aktif dari produktivitas pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai kemajuan aktivitas ekonomi, (Sukirno, 2001:423). Ekonomi yang maju, kesejahteraan masyarakat terjamin adalah dukungan besar terhadap politik di suatu negara. Negara dapat menjalankan ekonomi politik terhadap pemerintahan dan masyarakatnya dan mengambil serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.

Jika dilihat dari perkembangan ekonomi politik dalam sejarah peradaban dunia sendiri menunjukkan bahwa manusiamenggambarakan suatu sejarah berlawanandalam tingkatan yang didorong oleh persaingan ekonomi, adanya pembagian tata ruang.

Aksesibilitas ekonomi dan unit-unit produksi yang menyebabkan adanya tingkat persaingan pada saat perang dunia I dan II serta berjalannya imperialisme perdagangan bebas. Pada era penjajahan oleh bangsa Eropa di abad 16 – 20 M, hal ini merupakan suatu pencarian sumber daya yang belum diklaim untuk memperbanyak bahan produktivitas dalam pengembangan ekonomi. Dengan adanya kelas, dan rasa ketidakpuasan untuk menemukan yang baru dan mengklaim sebagai aset ekonomi tersebut maka perilaku yang mengaitkan ekonomi politik mulai bermunculan.

1.2. Pendekatan Ekonomi Politik

Pendekatan dalam ekonomi politik yang paling menonjol ialah digambarkan sebagai Suatu hubungan yang bersifat timbal balik antara sektor ekonomi dan politik (Heriyono, 2013:105). Dalam studi ekonomi politik ada banyak pendekatan yang berlabel “ekonomi modern” yaitu Pendekatan dari teori sistem, pendekatan institusional maupun tradisional serta pendekatan publik. Ekonomi modern merupakan penerapan metode model ekonomi tentang sebuah prefensi.

Pendekatan ekonomi politik meliputi 2 (dua) aspek penting didalamnya, yaitu ekonomi perekonomian (*the economy*) dan bidang politik (*polity*) (Heriyono, 2013:108). Dijelaskan sebagai berikut :

1.2.1. Pendekatan Ekonomi

Ekonomi tidak hanya memiliki 1 (satu) makna melainkan keterkaitan antara Perilaku yang memuat tindakan ekonomis oleh individu atau kelompok. Hal ini merujuk pada tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengarah pada barang dan jasa terhadap institusi pasar. Sementara pasar ialah wujud dalam mencapai efisiensi perilaku yang ditujukan untuk barang dan jasa dan seluruh

hal tersebut berkaitan dengan Bisnis, bagian vital dalam dimensi ekonomi, ini merupakan perilaku nyata yang mewakili berbagai aspek dalam perekonomian (Heriyono, 2013:106).

Tujuan ekonomi ialah mengumpulkan kekayaan, hal tersebut merupakan pembenaran bagi pasar dalam mengambil keuntungan (Heriyono, 2013:108). Mengacu pada aspek dan pendapat tersebut, artinya ekonomi mengarah pada bisnis dan berbagai tindakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Dalam pandangan ekonomi, ada hal yang disebut kalkulasi yakni suatu pendekatan dalam memanfaatkan apa yang tersedia meski bersifat terbatas guna memenuhi kebutuhan tanpa ada batasan. Pendekatan ini 'rasionalitas instrumental' yaitu berdasarkan nalar dalam mencapai tujuan, Kalkulasi ekonomi juga adalah ciri khusus yang dimiliki ekonomi modern (Heriyono, 2013:107-108). Manusia pada era modern dapat melihat lingkungan melalui sudut pandang kalkulasi, artinya pemikiran manusia akan berorientasi pada cara pemanfaatan sesuatu yang lebih kecil untuk mendapat keuntungan yang besar. Sehingga dalam menggunakan pendekatan kalkulasi ekonomi maka ialah meyakini ekonomi akan lebih unggul dari pada politik (Heriyono, 2013:109).

Konteks orientasi tersebut dilakukan dengan cara bisnis, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui sedikit pengorbanan kecil yang dihadapkan pada tuntutan lain dari masyarakat. Pengorbanan dan upaya tersebut dicapai berdasarkan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan menjadi pertimbangan bisnis agar berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, di sisi lain ialah sejauh mana pula kebijaksanaan publik dalam suatu negara yang demokrasi dapat memberikan ruang untuk dapat mengambil

keuntungan keberlangsungan bisnis yang dikembangkan.

1.2.2. Pendekatan Politik

Ekonomi politik secara pasti adalah hubungan timbal balik anatar dimensi, metode dan organisasi politik bersama aktivitas ekonomi. Mengarah kepada makna itu, konsep ekonomi politik menghubungkan semua kelas politik, baik dari segi pengaruh, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Ruslin, 2012:116).

Kekuasaan, kewenangan, kehidupan politik, pemerintahan, konflik dan resolusi politik semuanya adalah bagian dari dimensi politik dan ilmu politik (Heriyono, 2013:105). Ada banyak pandangan yang dikemukakan para ahli terkait konsep ilmu politik. Belum ada satupun yang memiliki satu pandangan mutlak untuk diterima secara umum karena semua pandangan memiliki kekurangan dan kelebihan yang teoritis didalamnya. lebih lanjut berbagai definisi politik dijelaskan sebagai berikut :

- a. Politik adalah segala hal tentang penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.
- b. Politik mengandung kekuatan yang mengarah untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam negara.
- c. Politik perwujudan kegiatan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.
- d. Politik juga adalah konflik pencarian dan pertahanan sumber-sumber penting tertentu.

Istilah ekonomi politik pertama kali adalah beberapa ahli ekonomi klasik di abad 18 dan 19 M. Oleh karena itulah pertama kali konsep ekonomi politik yang lahir pada abad ke-18 untuk membentuk pandangan dari berbagai macam hal dan perkembangan sosial yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan pandangan dari konsep ekonomi maupun hanya dari konsep politik saja.

Jika berpandangan dari satu konsep dalam menganalisa ekonomi politik maka tidak akan menyeluruh. Misalnya, Ekonomi yang dipandang sebagai bagian bidang sosial serta tidak hanya berkaitan dengan hubungan pada aktivitas ekonomis serta produksi atau kalkulasi individu atas pertimbangan keuntungan dan rugi saja (Heriyono, 2013:109). Ekonomi dalam sektor perekonomian yang hanya menekankan bahwa ekonomi memiliki teritori tersendiri dari yang lain serta memfokuskan pada hubungan-hubungan sosial yakni khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan pemanfaatan pasar atau segala hal untuk mencapai nilai ekonomis.

Pasar ekonomis sebagai wujud atau media mendapatkan tujuan dari ekonomi sendiri, yaitu keuntungan. Namun, semakin lajunyapasar modern dikembangkan memberikan dampak terhadap eksistensi pasar lokal sebagai andalan masyarakat dari berbagai kelas khususnya masyarakat menengah dan bawah. Oleh karena itu, Damayanti (2009:96) mengungkapkan analisisnya bahwa Pasar lokal dianggap sebagai jantung ekonomi masyarakat (Damayanti,2009:96). Pasar lokalmenjadi bagian dari faktor yang mendefinisikan ekonomi dan menggambarkan perananan penting menjadi satu dalam jalannya aktivitas sehari-hari masyarakat. Kebutuhan akan pasar lokal disinyalir sampai kepada tahap bergantung baik sebagai sumber pendapatan maupun keberlangsungan jalannya aktivitas ekonomi

pasar yaitu perdagangan.

Adapula pandangan ekonomi politik klasik yang juga lahir sebagai awal yang penting dan berkembang hingga sekarang. Tujuan kehidupan masyarakat dunia dan tujuan eksistensi pasar bisnisdinilai sama dalam pandangan dari pemikiran ekonomi klasik. Hal ini berdasarkan pemikiran individu terhadap perekonomian, dan nantinya akandiketahui pula mengenai bagaimana cara memahami dan ideologi dalam sebuah negara untuk menjalin relasi antara ekonomi dengan politik.

Dalam definisi ini, Ekonomi Politik termasuk dalam ilmu sosial yang berorientasi dalam cakupan ekonomi, dalam hal ini mencakup peningkatan pendapatan dalam suatu negara dan peningkatan sumber daya alam atau manusia dalam suatu negara. Kata ekonomi politik sudah diterapkan secara umum pada abad 18 di pakai oleh pemerintah dalam mememanajemen perdagangan, *barter* (uang dan pajak) dan ekonomi politik ini diterapkan juga dalam halpengkajian terhadap masalah ekonomi.

Ekonomi politik tergabung dalam salah satu bagian ilmu yang dijadikan kajian ilmiah dibeberapa institut pendidikan kemudian berkembang seiring adanya pemecahan bidang ilmu keduanya yang memuat isu- isu ekonomi politik (Lane, 1994:12). Ekonomi Politik yang Ilmiah ialah dimana dapat dilakukannya pengelolaan segala sesuatu yang beluh disentuh atau di benahi dan kemudian juga mempelajari cara berpikir dari menghasilkan suatu karya/barang, juga tenaga yang bekerja di perusahaan tersebut. Ilmu ekonomi vulgar juga menutupi pendayagunaan orang - orang yang memiliki modal sendiri dengan memperlakukan semua kerjasama sebagai pertukaran. Paparan tersebut merupakan sebuah ideologi bukan sains

Ilmu ekonomi dan ilmiahmemiliki perbedaan sekarang ,

Dimana karena terjadinya kesamaan terhadap suatu tafsiran ekonomi lebih baik dan membangun khususnya pemikiran oleh marxis, pada akhir tahun 1950 adalah di Eropa Barat dan Amerika Serikat, analisis Marxis meningkat, sehingga istilah ekonomi politik akhirnya muncul sebagai simbol. Ini menunjukkan keinginan untuk meninjau kembali perbedaan - perbedaan yang semakin besar dalam pendekatan rasional dari ilmu ekonomi dan kebutuhan akan nama kode di berbagai bidang, seperti di Amerika Serikat, juga. Pergeseran dalam ekonomi politik ini mengungkapkan tujuan baru dalam masalah dan strategi Marx (Lane,1994:12).

RANGKUMAN

Ekonomi dan Politik, dua konsep yang memiliki arti dan definisi masing-masing. Dua pemikiran dan pandangan yang juga memiliki orientasi tersendiri, lebih luas dari pada sekedar definisi masing-masing memiliki keterkaitan dalam pendekatannya. Baik dari bidang-bidang didalamnya hingga aktor-aktor yang terlibat. Perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi oleh eksistensi politik, begitupula sebaliknya jalannya politik dalam sebuah negara juga dapat dipengaruhi oleh eksistensi ekonominya. Hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan aktor didalamnya dan cara pencapaian ekonomi politik itu sendiri, baik pemerintahan maupun masyarakat menjadi hal vital dalam ekonomi politik karena menyangkut pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan negara.

Pertumbuhan ekonomi negara yang tidak stabil memberikan dampak buruk bagi eksistensi negara tersebut, ketidak terjaminan hidup masyarakat mengakibatkan pada runtuhnya kekuatan-kekuatan politik pemerintahan dalam suatu negara yang kehilangan kepercayaan masyarakatnya sehingga meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat dan berujung pada runtuhnya kekuatan negara secara menyeluruh yang menyimbolkan gagalnya kepemimpinan suatu negara.

Jalannya politik ditengah-tengah masyarakat, berdasarkan

kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan tidak dapat berjalan optimal ketika suatu negara telah mengalami kelemahan pada aspek kekuatan politik dalam negeri atau luar negeri. Dampaknya ialah menumpuknya hutang negara yang berakhir pada ketergantungan dengan pinjaman luar negeri ataupun berujung pada peralihan control terhadap negara yang ditanggung oleh negara lain untuk memperoleh kekuatan politik demi membangun ulang ekonomi politik dalam suatu negara.

Segala tindakan dan aktivitas dalam ekonomi politik secara garis besar meliputi aktivitas perdagangan, bisnis, dan pengambilan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan suatu negara. Jika keduanya tidak berjalan beriringan atau berat sebelah, artinya belum ada keseimbangan suatu negara.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Kemukakan menurut anda maksud dari definisi ekonomi politik menurut Marx dan Engels ? berikan contohnya.
2. Jelaskan pendekatan ekonomi politik menurut Heriyono, dan berikan contoh !

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara

Paraf Dosen	
-------------	--

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum perkuliahan
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

Formulir No 2

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen	
-------------	--

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam.2008.”Dasar-dasar ilmu politik, jakarta : PT Gramedia
- Damayanti,Christy.2009.”Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi”.
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.9 No.1
- Deliarnov. 2006. “Ekonomi Politik, Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Kom-prehensif”. Jakarta : Erlangga.
- Heriyono.2013.”Ekonomi Politik Dalam Bisnis”.Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2
- Khaldun, dan Rahman.2008.”Muqaddimah Ibn Khaldun”. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Lane, Jan Erik. 1994. “Ekonomi politik Komparatif”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Marx, Karl. 1994. “Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik”. Jakarta: Hasta Mitra
- Ruslin.2012.”Relasi Ekonomi POLitik dalam Perspektif Dependencia”. Sulesana Vol.7 No.2
- Sukirno,Sadono.2001.”Ilmu Ekonomi Pembangunan”. Jakarta, Bumi aksara.

BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti topik dalam bab ini, mahasiswa dapat menelaah:

1. Memperoleh gambaran tentang relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik
2. Memperoleh unsur ekonomi dalam politik

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik serta memperoleh unsur ekonomi yang ada dalam politik.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab II dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah

itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

1.1. Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik

Studi ekonomi politik hadir ketika abad ke delapan belas di Inggris dimana pada saat itu pola pikir serta analisis platform yang akan dipakai dalam memakmurkan perekonomian negara Inggris Raya yang berhadapan dengan negara pesaing lainnya dan negara jajahan seperti negara Portugis, negara Spanyol, dan negara Perancis. Keberadaan dua aspek ilmu ini bisa dimengerti sebab studi ekonomi pada mulanya diperuntukan supaya meningkatkan derajat kemashalatan rakyat di sebuah kawasan atau negara. Dalam meraih peningkatan perekonomian, peran serta suatu negara sangatlah penting dimana negara nantinya akan mengatur sistem perekonomiannya.

Ilmu ekonomi bisa dipandang mewakili usaha dalam hubungannya bersama studi politik akan terlaksana dalam ilmu ekonomi politik. Ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu mengenai reaksi individu dan bagai mana masyarakat menetapkan cara untuk memanfaatkan sarana yang minim serta mempunyai beberapa pilihan pemakaian, dalam hal menghasilkan berbagai dagangan, untuk disalurkan – baik sekarang atau masa yang akan datang – kepada semua golongan yang berada di sebuah masyarakat (Samuelson dan Nordhaus,1994:5)

Ada dua bagian ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dimana menurutnya ekonomi makro akan membahas tentang berbagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga, banyaknya orang yang tidak bekerja serta kebijakan ekonomi

nasional yang berkenaan dengan masalah tersebut . Terdapat mikro ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai cara bagaimana keperluan sehari-hari dan juga produsen dalam menentukan sesuatu yang sulit didapatkan dalam sebuah perdagangan. disini akan mengatur bagaimana keputusan produsen untuk menentukan harga barang dan bagaimana keadaan barang di pasar akan tetap ada. untuk proses ini hukum penawaran dan permintaan akan berlaku (Samuelson dan Nordhaus,1994:5). Berdasarkan pengertian bisnis yang telah dipaparkan, maka untuk menganalisis bagaimana suatu perusahaan bisa berpengaruh pada suatu negara di perlukan untuk mempelajari ekonomi makros. Suatu perusahaan dituntut untuk memproduksi apa yang diperlukan masyarakat sampai terciptanya kesesuaian antara persediaan dan permintaan. Keuntungan yang didapatkan produsen tidak sepenuhnya untuk produsen, dimana nantinya akan ada kewajiban dari produsen untuk membayar pajak dan dari pajak inilah dipakai untuk biaya pengeluaran negara.

Saat ini terdapat ahli ilmu ekonomi yang mengelompokan ekonomi politik dengan penerapan makro ekonomi disejajarkan dengan beberapa penerapan ekonomi lainnya, seperti keuanagan msyarakat banyak, ekonomi buruh dan ekonomi kesehatan. ekonomi politi sering disebut proses makro ekonomi karena hal ini bersipat pada tahap pengujian sebelum membuat sebuah keputusan oleh lembaga politik seperti anggota DPR dan pihak pemerintah yang mempunyai wewenang. dalam kebijakan yang dibuat acap kali bersifat menguntungkan pihaknya sendiri daripada memikirkan kepentingan ekonomi itu sendiri. Saat ini usaha merupakan pembelajaran ilmu khusus dimana diwajibkan mempunyai keterkaitan dengan ilmu lainnya.

Politik digunakan sebagai cara untuk menata sebuah negara, sedangkan bisnis sebagai cara untuk menunjang kemashalatan hidup warga negaranya.

Politik merupakan seni yang dicakupi perkara-perkara yang nyata dan mungkin, dan sebab dalih inilah ia meminta kontribusi ilmu ekonomi. Para elit pembuat kebijakan dapat berharap pada ekonom bahwa mereka semestinya menjelaskan kondisi sebenarnya dan menetapkan konsekuensi dari sebagian perilaku potensial dalam hubungannya dengan keadaan awal persamaan (Mubyarto, 1993:17).

Ekonomi politik merupakan kajian ilmu ekonomi yang lebih luas mencakup keterlibatan aspek sosial dan aspek kenegaraan (Todaro, 1985:352). Sangat dipahami bahwa ekonomi adalah bagian dari ekonomi politik. Ekonomi politik, bagaimanapun, jauh lebih luas daripada ekonomi konvensional. Jika kita amati kelompok elit ekonomi dan politik seperti apa yang berusaha mengambil keputusan untuk mendistribusikan modal produktif terbatas untuk masa kini dan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat luas, maka fokus analisisnya meliputi sosial dan prosedur kelembagaan.

Istilah ekonomi politik baru populer dan sangat terkenal pada abad ke 1, dipopuleran oleh beberapa penulis yang mencantumkan kata-kata tersebut dalam buku yang mereka tulis. Istilah tersebut dipakai agar memperlihatkan bagaimana pemerintah memajemen strategi dagang dan *barter* (uang dan pajak) (Suryadi, 2006:2). Searah dengan hal tersebut, Selain itu, jika pendekatan ini berfokus pada bidang ekonomi politik bawahan, maka harus diapresiasi. Artinya, instrumen ekonomi sebagai cara proses pasar, biaya, dan investasi dievaluasi dengan menggunakan pengaturan sistem politik di mana aturan atau peristiwa ekonomi tertentu terjadi, pendekatan ini memandang ekonomi sebagai panggung untuk pelaksanaan suatu tindakan (cara bertindak),

sedangkan politik menawarkan ruang untuk tindakan itu (tempat bertindak)(Ruslin, 2012:116).

Sementara ekonomi politik mengalir cukup banyak, namun secara longgar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, dilihat dari sudut pandang konteks teori ekonomi politik. Yang pertama disebut liberal, sedangkan anggota kedua dari komunitas liberal mengkritik (Marxisme). Interpretasi pertama berfokus pada hal-hal berikut: sekolah liberalis (mencakup ekonomi politik liberal klasik, ekonomi politik neo-klasik, ekonomi politik baru, dan neoliberalisme). Alasan logika ekonomi yang sehat dan mekanisme kerja pasar diuraikan oleh partai ini. Yang kedua adalah fusi pemikiran Marxis, yang menggunakan banyak analisis masalah dan kekuatan untuk meneliti keputusan ekonomi yang muncul dari proses politik. Partai kedua ini umumnya merupakan bagian dari kelompok ekonomi politik radikal. Meskipun ekonomi politik radikal sebenarnya sangat beragam, ia hanya terbagi dalam kelas-kelas yang bergantung.

Ada dua golongan yang menganalisa ketergantungan tersebut Pertama, dalam studinya, mengambil keuntungan dari perjuangan kelas internasional antara pemilik kapital (kapitalis) dan warga (proletariat), konsep pengembangan kekuatan komunitas kelompok pemerintahan yang hanya sebagai instrumen kota metropolis juga harus diperhitungkan. Kemudian golongan kedua dari sudut pandang nasional, ini mengeksplorasi ketergantungan dan Regional dengan melihat kondisi di dalam dan di luar zona, dimana komposisi dan kondisi internal dipandang sebagai pengaruh yang muncul dari dalam, sedangkan kondisi eksternal mempengaruhi internal ini, baik dulu maupun sekarang. pendekatan kedua ini diadopsi oleh para ahli dari berbagai daerah yang relatif terbelakang dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka, khususnya di Amerika Latin dengan munculnya teori ketergantungan (*Dependencia*) (Ruslin, 2012:117).

1.2. Unsur Ekonomi dalam Politik

Untuk tetap eksis sebuah perusahaan harus masuk kedalam mengetahui seluk beluk politik. seluk beluk politik suatu negara adalah sesuatu yang wajib mendapatkan perhatian dari institusi terkait. Suasana politik yang aman akan lebih menjanjikan perkembangan perusahaan. maka dari itu seorang yang dikatakan manager yang handal tidak cuma dilihat dari aspek bagaimana sisi ekonominya saja tapi bagaimana juga seluk beluk yang ada dalam politik. sabagai contoh ketika terjadi kerusuhan pada tahun 1998 di jakarta menyebabkan banyak investor memikir ulang kembali untuk berinvestasi di jakarta lagi. hal ini untuk mengantisipasi kalau suatu saat kejadian seperti ini terulang kembali.

Pada sisi politik, suatu negara biasanya menganut sebuah ideologi, sama halnya dengan Indonesia dimana ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah pancasila. pancasila disini sebagai sendi-sendi yang masuk kedalam kehidupan masyarakat. jika ideologi Indonesia adalah pancasila apakah hal ini sama dengan sistem ekonomi indonesia yang sesuai dengan pancasila?

Menasionalisasi mempribumikan industri tiada berupaya untuk membuat suatu Negara yang bisa berdiri sendiri, sangat minim sekali suatu perusahaan dalam Negara Indonesia yang mampu beroperasi lama, salah satu faktornya bisa jadi karna keterbatasan alat yang canggih, pengetahuan yang luas dan masyarakat kurang memiliki kesadaran diri untuk melakukan perubahan, hal ini bisa menyebabkan bangkrutnya suatu perusahaan, dan hal ini memiliki dampak yang sangat besar terlebih pada pedagang pasar, contoh lain ketika seseorang menjadi agen pulsa yang menjual dengan untung yang sedikit karna harga telah ditentukan oleh swasta, hal ini membuat lemahnya suatu Negara dan sulit untuk melakukan tindakan (Heriyono, 2013:102).

Para pakar ekonomi memaparkan bahwa indonesia cenderung kearah kapitalisme. hal ini di jelakan dalam poin-poin oleh (Mubyarto, 1993:39) sebagai berikut:

1. Berbagai bisnis yang ada dinegara Indonesia menganut sistem bebas di semua sisi. semua bisa berbuat sesuka hati dalam berbisnis. namun walaupun begiti ada beberapa yang tidak dapat di bisniskan yaitu listrik dan kereta api karena masih dimiliki oleh negara.
2. Masih ada hartawan atau orang memonopoli bisnis di Indonesia. dimana hal ini sudah ada sejak pada era Suharto. Ada banyak nama yang mempunyai bisnis besar di Indonesia pada era Suharto seperti Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Bob Hasan dan yang lainnya. dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Amerika Serikat sendiri sebagai negara dengan penganut sistem Kapitalis murni sangat menentang hal ini.

Sesungguhnya sistem di Indonesia memeberi ruang yang sebesar-besarnya kepada warganya untuk melakukan bisnis. pemerintah cuma berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk membuat suasana iklim bisnis tetap tentram. sebagai contohnya pada tahun 1999 dibuatkanlah UU tentang anti monopoli untuk membuat keadilan dalam berbisnis dimana pemerintah membuat komisi pengawasan persaingan usaha atau disingkat menjadi KPPU. tugas dari KPPU ini adalah mengawasi bagaimana implikasi dari UU tentang anti monopoli. namun tujuan yang mau di capai tidak sesuai rencana. sebagai contohnya perusahaan pesawat terbang yang menurunkan harga jual tiket lebih rendah tetapi pemerintah hanya berdiam dan tidak mencegahnya, dari kejadian ini tentu akan sangat membahayakan konsumen dari pengguna pesawat terban

dimana harga yang murah akan membuat pelayanan yang buruk juga.

Bukan suatu hal yang asing yang pernah kita dengar bahwa politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipilah satu sama lain, baik dalam suatu kebiasaan politik ataupun ketetapan pemerintah didalam suatu perkembangan ekonomi. Ketetapan komunitas pemerintah dibidang pabrik paling banyak dampak terhadap peruntukan dalam kemajuan yang sering disebut Rostow, bagian lampau tumpuan, rakitan asumsi Olson mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam negeri (*institusinal sclerosis*) didalam suatu wilayah mengakibatkan menyeluruhnya perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Heriyono, 2013:102).

Mengapa hal tersebut bisa berlaku? Hal tersebut dapat terjadi akibat para pakar politik seperti halnya legislatif sudah pernah memindahtangankan wilayah Indonesia kenegara asing, sewaktu kedudukan wilayah dibatasi, setidaknya ulasan seorang penulis dalam hal analisis ekonomi dan kekuasaan.

RANGKUMAN

Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik dalam Studi ekonomi politik sejarahnya diterapkan dalam memakmurkan perekonomian negara Inggris Raya yang berhadapan dengan negara pesaing lainnya dan negara jajahan seperti negara Portugis, negara Spanyol, dan negara Perancis. Keberadaan 2 aspek ilmu ini bisa dimengerti sebab studi ekonomi pada mulanya diperuntukan supaya meningkatkan derajat kemashalatan rakyat di sebuah kawasan atau negara. Dalam meraih peningkatan perekonomian, peran serta suatu negara sangatlah penting dimana negara nantinya akan mengatur sistem perekonomiannya. Relasi kedua hubungan Ekonomi dan Politik ini saling ketergantungan satu sama lain, yakni bagaimana aspek ekonomi menjadi kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan politik. Adanya interaksi antara ekonomi dan politik juga menunjukkan ketergantungan keduanya, bahwa kedua aspek ini saling memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangannya.

Unsur Ekonomi dalam Politik salah satunya keberadaan perusahaan komersil, untuk tetap eksis sebuah perusahaan harus masuk kedalam mengetahui seluk beluk politik. Pada sisi politik, suatu negara biasanya menganut sebuah ideologi, misalnya yang

dianut Indonesia dimana ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah pancasila. pancasia adalah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi ekonomi sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Jelaskan relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik yang dimaksud Samuelson dan Nordhaus ? berikan contohnya.
2. Jelaskan faktor ekonomi dalam politik Indonesia yang dimaksud Mubyarto? Berikan contohnya !

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara

Tuliskan Pemahaman Saudara	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

Formulir No 2

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen	
-------------	--

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

Formulir No 3

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen

--	--

DAFTAR PUSTAKA

- Heriyono.2013.Ekonomi Politik Dalam Bisnis. Jurnal Ekonomi Vol.1
No.2
- Mubyarto.1993.Ekonomi Pancasila. Jakarta :LP3ES
- Ruslin.2012.”Relasi Ekonomi POLitik dalam Perspektif Dependencia”.
Sulesana Vol.7 No.2
- Suryadi, Budi.2006. Ekonomi Politik Modern.Yogyakarta: IRCiSoD
- Samuelson dan Nordhaus . 1994 . Ekonomi . (terjemahan) Wasana,
Jaka . Jakarta : Erlangga
- Todaro, Michael, P.1985. Economic Development In The Third
World. New York; Logman Inc

BAB III

TEORI DALAM

EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memahami teori dalam ekonomi politik
2. Memahami teori defedencia

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang teori dalam memandang ekonomi politik.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab III dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

1.1. Teori – Teori Dalam Ekonomi Politik

Ilmu politik merupakan agian ilmu sosial. Pembelajaran ilmu ekonomi politik berarti mempelajari dua gabungan disiplin ilmu atau yang biasa disebut interdisiplin yang mana nantinya bisa untuk mengkaji sesuatu yang relevan bersifat ekonomi yang disertai sosial. ketika hal ini digabungkan maka akan membuat satu analisa yaitu ekonomi politik.

Tujuan dari ilmu ekonomi politik secara umum adalah bagaimana melihat adanya timbal balik dari keduanya, baik dari politik maupun sebaliknya. namun dalam perkembangan yang terjadi ada perubahan dimana kata dari ekonomi politik bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan dari segi ekonomi dan politik, seperti, ada kekurangan dimana dari kekurangan ini menyebabkan ada dua golongan yang melakukan upaya mencari benang merah dari permasalahan ini sampai pada akhirnya bisa memaksimalkan lagi analisisnya dengan menggunakan teori ekonomi politik. untuk memaksimalkan hasil dari studi ini dilihat lagi bagaimana sistem ekonomi dinegara tersebut (Heriyono, 2013:100-101).

1.1.1. Unsur Politik

Ilmu politik komperatif mulai mendapat banyak perhatian dalam pembangunan politik, namun hal ini akan menimbulkan konflik karena ilmu politik tidak mempunyai kerangka dalam pembangunan politik sementara pada sisi ekonomi bisa dijelaskan dengan angka dan ada tolak ukurnya untuk mengetahui perkembangannya (Mas'oed,1990).

1.1.2. Studi Komparatif dengan Sistem Politik

Pada tahun 1959 dalam sebuah artikel Seymour Martin Lipset seorang sosiolog menjelaskan lebih jauh dalam *politics and markets* (1997). Mempersoalkan kehadiran dan badan demokratis dalam satu cara pemerintahan, atas ekonomi kelompok, akan terdapat satu yang dapat melebihi suatu cara ekonomi pasar pada mulanya produksi distribusi sampai konsumsi merupakan sebuah permulaan dari kegiatan ekonomi yang nantinya akan diserahkan secara penuh pada manajemen pemasaran, ekonomi terencana juga diidentikkan dengan sosialisme dalam cara ekonomi yang beragam dan terencana yang merupakan struktur ekonomi yang mengatur investasi dan alokasi modal sehubungan dengan rencana ekonomi dan keluaran yang direncanakan.

Persoalan selanjutnya adalah akan susah untuk masalah daerah yang memakai cara ekonomi campuran yang menghubungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya kapitalisme dan sosialisme didalam masuk dalam ekonomi campuran, maksudnya yaitu adanya suatu kerjasama antara pasar dan pemerintah yang mengatur perekonomian nasional. Bubarnya komunisme di salahsatu Negara pecahan Uni Soviet pada tahun 1989 ikut membubarkan antara sosialisme dan kapitalisme.

Alternatif masyarakat merupakan pandangan oleh setiap orang untuk memastikan suatu pilihan sebagai hal yang masuk akal. terlebih dalam ekonomi politik, penyelidikan yang dilakukan terarah atas seorang yang menjadi pemeran. Pemeran dianggap sebagai pemeran

dalam suatu aktivitas ekonomi dan politik yang berdasarkan atas anggapan utama yang menunjukkan keputusan yang masuk akal secara perorangan di dalam suatu lembaga non-pasar. Akan tetapi, lantaran keistimewaan yang longitudinal, hingga produk yang dihasilkan dari bentuk-bentuk pilihan masyarakat yang berlainan antara satu wilayah ke wilayah lain.

1.2. Teori Dependencia

Dependencia hadir di tahun 60-an di Amerika Latin, atas wujud perlawanan Dunia Ketiga. pada pola modernis Eropasentris (Hettne, 2001:146). Searah dengan pendapat tersebut, pendapat lain juga mengungkapkan bahwa teori yang saling ketergantungan pada hakekatnya ingin menjelaskan masalah mundurnya negara yang berada di bawah kolonialisme dunia ketiga dengan memperlihatkan secara Internasional (Mas'ood, 1990:204).

Ancangan ini makin mengarah dan merata memfokuskan atas bagian-bagian makro dalam bentuk ekonomi dan politik, bukan hanya itu didalam teori menyebutkan dependensi contohnya, ada yang menyebutkan bahwa bentuk ekonomi politik neo-marxis sangat sukar untuk dibuktikan kebenarannya, apabila hal itu benar bahwa neo-marxis sudah bisa mempercepat pertumbuhan agen dalam bagian analisis ekonomi dan politik dengan melakukan ancangan komperatif dalam kontraks bagian ekonomi dan politik. ancangan tersebut juga mengamati dan membedakan beraneka macam perbedaan antara suatu wilayah dalam aspek ketentraman masyarakat, perkembangan ekonomi dan dependensi bagian yang ada dalam masyarakat.

Kondisi ketergantungan merupakan kondisi dimana perekonomian beberapa negara hanya menjadi penerima dari aksi negara di atasnya. Masalah dari ketergantungan atau dependensi

terjadi ketika ekonomi dari suatu negara yang memiliki power untuk membuat sesuatu untuk negaranya sendiri, sementara disisi lain negara yang tidak mempunyai power maka akan tetap tergantung kepada negara yang mempunyai power, namun akan tetap ada sisi positif maupun negatif dari hal ini (Theotonio, 1970:231))

Teori dependensi tidak hanya berisikan kritikan yang keras terhadap perkembangan teknologi dan sumber daya dari Eropasentris, tetapi dapat pandangan perspektif intelektual alternatif yang berlandaskan di dunia ketiga (Hettne, 2001:146). Awalnya, teori ini mengklarifikasi masalah keterbelakangan bekas jajahan Dunia Ketiga dan melihatnya dalam pengertian global melalui teori struktural yang difokuskan pada ide-ide fundamental berbasis materialisme. Hipotesis ini kemudian merupakan produk dari perlambatan pembangunan di Dunia Ketiga dan dipicu oleh faktor internal di kawasan yang bersangkutan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori ini lahir dari dua pusat, yang pertama adalah teori imperialisme, yang kedua adalah studi tentang pertumbuhan di negara-negara marjinal yang diwakili oleh ide-ide tokoh politik (Budiman, 1995:46). Pendapat lain dari Raul Prebisch, mengkaji adanya spesialisasi produksi yang berdasarkan istilah komparatif bagi negara maju dengan produksi pertanian yang semula diharapkan dapat membangun interdependensi pada suatu wilayah, berdampak negatif pada negara-negara yang terpinggirkan. Karena barang-barang manufaktur lebih mahal daripada produk pertanian, yang dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam neraca perdagangan negara-negara pertanian (Ruslin, 2012:117).

Mengenai pengembangan di negara duniaketiga,negara negara

dengan metode perdagangan bebas akan memberikan pengaruh sistem kapitalismenya pada negara menengah kebawah yang sedang berkembang dan bertujuan untuk membuat negara itu lebih baik lagi. namun kapitalisme dapat menyebabkan negara-negara pra-kapitalis akan menghalang kemajuan serta hidup secara terus menerus dalam keterbelakangan. Dalam sistem kapitalis di negara yang berlandaskan kapitalis berbeda dengan sistem kapitalis yang ada di negara terpinggirkan. pada negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena dampak gejala penyakit keterbelakangan dan kelainan dalam pertumbuhan atau biasanya di sebut kretinisme, orang yang di serang dampak ini tetap kerdil dan tidak bisa berkembang. Ini juga merupakan kemitraan antara kaum borjuis imperialis dengan para pejabat di negara-negara pinggiran yang, dengan mengorbankan kepentingan warga negara-negara yang terpinggirkan, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada modal internasional dan borjuasi asli.

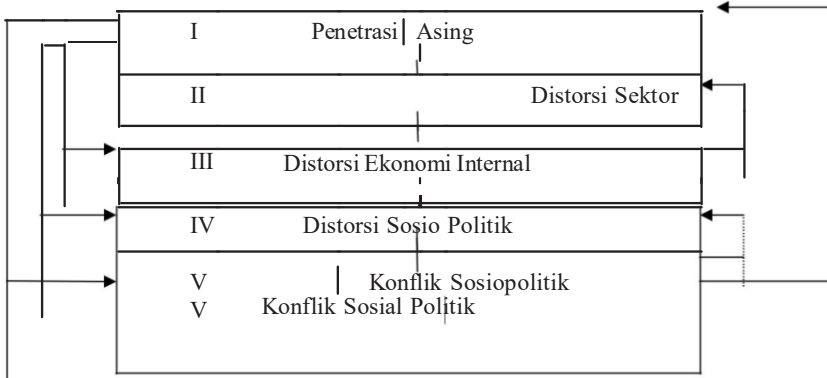
Pola hubungan metropolis dan negara satelit. Negara maju akan terus berkembang, berusaha menjelaskan hubungan antara negara maju dan negara berkembang, sedangkan negara berkembang akan tetap seperti itu. Sampai pada suatu saat negara berkembang bisa berjalan sendiri untuk memajukan negaranya sendiri tanpa negara maju. namun sebuah situasi akan tetap menghubungkan keduanya karena di masa lampau, dimana ada daerah yang mempunyai kepentingan pribadi/golongan dari para kaum borjuis.

Tahapan revolusi, yakni jika dalam masyarakat feodal diperlukan ada perubahan buruh dahulu yang akan menciptakan rakyat feodal.

Reformasi yang diinginkan adalah jalan langsung menuju sosialisme. Sekalipun eksploitasi ingin dihapuskan, itu hanya dapat mengubah jenis eksploitasi dan memperjuangkan sistem kapitalis yang terus berkembang pesat dan mendominasi sektor pertanian yang sama melalui monopoli perdagangan (Abraham,1991:169)

Tolok ukur Dependencia yang terkenal radikal, mengusulkan cara untuk memajukan dan menghilangkan ketergantungan pada negara-negara industri untuk pembangunan negara-negara yang terpinggirkan(Ruslin, 2012:118). Namun disisi lain, faktanya negara negara di dunia mengalami terobosan dan sangat bergantung pada negara indutri maju terutama ekonomi dunia. Terjadi inefisiensi ekonomi ketika terobosan dilakukan, yang sebagaimana ditunjukkan juga terkait dengan aspek lain dalam struktur sosial politik negara marjinal (Mas'oed,1990:206).

Gambar 1
Pola sederhana Teori *dependencia*



Sumber : Ruslin, 2012:119

Dari skema diatas, terlihat jelas penetrasi luar dan dependensi dari luar mengakibatkan adanya bias dalam jumlah banyak dalam kerangka ekonomi negara miskin yang pada kesempatannya mengakibatkan konflik sesama yang lumayan parah sehingga mendorong terbentuknya otoriter pemerintah di masyarakat yang masih bergantung pada negara. Penetrasi ini dapat terjadi dengan berbagai cara, termasuk ekonomi, politik dan budaya.

Ketika terjadi pemikiran negatif masyarakat ketergantungan tentang pengaruh pola hubungan ekonomi-politik negara-negara pinggiran, muncul pemikiran ketergantungan lain yang cukup berbeda dari pandangan sebelumnya tentang “prototipe *dependencia*” salah satunya adalah Theotonio Dos Santos, yang mana lebih "halus" daripada pemikiran "kasar, dogmatif" ala Frank. (Siregar, 1999:240).

Theotonio (1970) sangat percaya jika berkembangnya negara-negara terbelakang, menurutnya, setelah menjalin hubungan dengan negara-negara sentral, masih ada kemungkinan berkembang di negara-negara pinggiran. Meski, dalam arti ketergantungan, tetap saja.

Negara pinggiran hanyalah sebuah negara imajiner dari negara pusat, sebaliknya yang membuatnya percaya bahwa negara imajinernya pasti akan tumbuh dan berkembang ketika negara kaya menjadi negara maju dan maju, meskipun dalam perkembangan yang bergantung atau perkembangan yang harmonis (Frank,1967:167)

Menurut filosofis, teori dependensi akan melihat lagi pengertian pembangunan ekonomi, dimana pembangunan bukan harus didefinisikan hanya semata-mata cara menjalankan industrialisasi, pengeluaran (output), serta kenaikan produktivitas, tapi cara menjalankan pembangunan sesuai dengan yang diungkapkan (Deliarnov,2005:89).

Sama halnya membentuk pembebasan, yakni kemerdekaan dari kekangan elit- elit ekonomi serta kemerdekaan negara berkembang dari kekangan susunan perekonomian dunia.(Ruslin, 2012:114). Penggolongan beserta barometer peningkatan ekonomi bermula berdasarkan konsep pembagian kerja Internasional atas beberapa abad silam yang percayai oleh pakar ekonomi klasik, termasuk orang yang memiliki kedudukan bermamfaat dalam mengambil keputusan perdagangan internasional suatu negara. Dalam rancangan keunggulan komparatif yang diatur oleh masing-masing negara, definisi ini diatur sedemikian rupa sehingga berdampak pada terciptanya spesialisasi produksi untuk setiap negara sesuai keunggulan komparatif masing-masing negara.

Oleh sebab adanya spesialisasi tersebut, hingga terbentuklah

kegiatan jual beli dalam skala Internasional, dengan anggapan kegiatan jual beli ini diinginkan dapat memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Kedua negara yang telah di kelompokkan tadi dapat bekerja sama dalam kelangsungan kehidupan suatu negara, barang-barang hasil produksi dijual dengan harga murah ke Negara yang menekuni bidang pertanian, begitu juga sebaliknya, hal inilah yang dinamakan keuntungan komparatif Todaro mengemukakan bahwa neagara yan mengisloasikan dirinya sendiri akan memiliki perkembangan secara ekonomi yang kurang baik jika dibandingkan dengan negara yang membebaskan dirinya dan ikut serta dalam perdangan bebas (Todaro,1985:383).

Akan tetapi faktanya, yang diinginkan semakin didepan, yang terjadi malah jarak yan signifikan dari kedua negara tersebut. Negara yang melakukan produksi industri akan semakin maju atau kaya, namun negara yang melakukan produksi hasil pertanian akan semakin terbelakang atau miskin (Budiman,1995:18). Dengan demikian pembangunan ekonomi yang baik bagi suatu negara adalah pembangunan yang menyatu bersama kegiatan ekonomi, karena memang hakikatnya semua negara akan saling bergantung atau membutuhkan negara lain, dan akan saling menguntungkan jika bisa saling menutupi kekurangan tiap negara.

RANGKUMAN

Unsur Politik dalam ekonomi maupun sebaliknya banyak mengalami perkembangan dalam Studi Komparatif dengan Sistem Politik kehadiran dan badan demokratis mulai dipermasalahkan dalam satu cara pemerintahan, atas ekonomi kelompok, akan terdapat satu yang dapat melebihi suatu cara ekonomi pasar pada mulanya produksi distribusi sampai konsumsi merupakan sebuah permulaan dari kegiatan ekonomi yang nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melihat adanya berbagai pro dan kontra dalam pengaruh atau perkembangan ekonomi politik. Ada beberapa teori dalam melihat ekonomi politik secara lebih spesifik.

Teori Dependencia muncul sejak era tahun 60-an di Amerika Latin, atas wujud perlawanan Dunia Ketiga. Teori ini mengarah pada sektor ekonomi terfokus makro dalam bentuk ekonomi dan politik, bukan hanya itu didalam teori menyebutkan dependensi contohnya, ada yang menyebutkan bahwa bentuk ekonomi politik neo-marxis sangat sukar untuk dibuktikan kebenarannya, apabila hal itu benar bahwa neo-marxis sudah bisa mempercepat pertumbuhan agen dalam bagian analisis ekonomi dan politik dengan melakukan anangan komperatif dalam kontraks bagian ekonomi dan politik. Teori ini melihat bagaimana politik bergantung dengan kekuatan ekonomi yang dibangun.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Jelaskan teori ketergantungan dalam ekonomi politik menurut Theotonio ? berikan contohnya !

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum perkuliahan
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

Formulir No 2

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Francis.1991."Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan". Yogyakarta ; Tiara Wacana
- Budiman,Arief.1995."Teori Pembangunan Dunia Ketiga".Jakarta; PT Gramedia
- Hettne,Bjorn.2001."Teori Pembangunan Dan Dunia Ketiga".Jakarta; Gramedia
- Deliarnov.2005."Ekonomi Politik.Jakarta; Erlangga
- Heriyono.2013."Ekonomi Politik Dalam Bisnis".Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2
- Mas' oed, Mohtar.1990."Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi".Jakarta; LP3ES
- Ruslin.2012."Relasi Ekonomi POLitik dalam Perspektif Dependencia". Sulesana Vol.7 No.2
- Theotonio, Santos.1970."The Sctructure of Dependence". American Economic Review, Vol 60 (2)
- Todaro, Michael, P.1985. Economic Development In The Third World. New York; Logman Inc
- Siregar,A Effendi.1999."Arus Pemikiran Ekonomi Politik". Yogyakarta; Tiara Wacana;1999
- Frank,A Gunder. 1967."Capitalism and Development in Latin America".New York; Monthly Review Press

BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memperoleh pemahaman implikasi ekonomi politik terhadap negara
2. Memperoleh perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi
3. Memperoleh perubahan struktur dan ekonomi global
4. Memperoleh pemahaman politik dalam ekonomi

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang adanya implikasi ekonomi politik terhadap negara, perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi, munculnya perubahan struktur dan ekonomi global serta posisi politik dalam

ekonomi.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab IV dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

1.1. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara

Adanya pendapat dari aliran sosial yang berpikiran tentang masalah mengatur dan mengadili adalah urusan pemerintah (Rahayu,2010:14). Semua orang mempunyai cita – cita mengenai adanya peningkatan di dalam kelayakan hidup. Yaitu bertambahnya pencapaian berupa angka dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling utama untuk mewujudkan harapan rakyat dalam kelayakan hidup di bidang ekonomi adalah Negara.

Kumpulan yang sangat utama adalah keluarga, akan tetapi ada banyak koalisi lain yang mencukupi berbagai keinginan manusia, contohnya saja demi menggapai hajatnya di bagian ekonomi di banggunya koalisi ekonomi seperti koperasi, kelompok dagang, kelompok nelayan dan sebagainya (Budiardjo, 2008:46-47). Untuk mencukupi keperluan, keinginan maka akan melakukan interaksi dengan manusia lain dengan arah berorganisasi dari berbagai kumpulan anggaran koalisi.

Menurut Laswell (dalam Budiardjo 2008:47) Pada umumnya manusia membutuhkan delapan nilai. Dalam mencermati kelompok warga di sekitarnya, yaitu orang barat memberikan delapan nilai, yaitu:

- Kekuasaan

- Kekayaan
- Penghormatan
- Kesehatan
- Kejujuran
- Keterampilan
- Pendidikan/penerangan
- Kasih sayang

Dari hadirnya bermacam mutu dan keinginan yang mesti melakukan itu, berarti manusia menjadi komponen dari bermacam-macam kumpulan sekaligus. Pengertian kuasa adalah suatu interaksi yang mana satu orang atau kumpulan manusia dapat memastikan aktivitas seseorang atau kumpulan lain ke tujuan dari kelompok utama. Pada suatu interaksi kedaulatan pasti ada salah 1 golongan yang lebih mampu dari pihak lain. Jadi, selalu ada interaksi tidak pas. Ketidak pas ini selalu memicu dependensi (*dependency*); dan lebih tidak seimbang pada interaksi ini, bertambah banyak pula kelakuan ketagihan. Hal ini oleh angkatan filosof decade 20-an selalu dikatakan sebagai kekuasaan, hegemoni, atau penguasaan .

Melihat kearifan dan kehidupan ekonomi melalui strategi kedaulatan bermakna memakai strategi ekonomi politik. Menurut sudut pandang ekonomi klasik, Praktik barter barang dan jasa hanya berfokus pada kekayaan materi dan kapasitas penegakannya, berdasarkan ketersediaan tenaga kerja dan sumber daya alam. Tenaga kerja memiliki arti yang sama dengan modal produksi dan bahan esensial, sehingga disebut sumber daya manusia. Menurut pendekatan ini, pasar adalah agen sosial pertama dan pengambil aset yang terlibat dalam pasar adalah

Siapa yang akan memutuskan apa yang akan diterapkan? Posisi individualisme yang bebas dari campur tangan negara mengatur jalannya bisnis ini, karena campur tangan negara dianggap tidak memberikan banyak keuntungan. Negara mempunyai peran untuk menjaga peninggalan kekayaan dan menjaga lingkungan untuk diwarisi ke generasi selanjutnya untuk kenyamanan generasinya dalam urusan ekonomi. Sedang pada sisi konsumsi rumah tangga mereka menikmati hasil yang sudah dibuat dan bagaimana menghasilkan yang maksimal dari hal itu. Tujuan dari peningkatan ekonomi ini bukan hanya dibuat untuk kenyamanan saja namun diperlukan strategi yang lain.

Untuk menentukan sebuah strategi yang baik maka diperlukan sebuah susunan yang menyeluruh dalam ekonomi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Negara mempunyai peran yang saling berkaitan, yang mengutamakan beberapa pendekatan yang bisa di jadikan alat untuk membuat kemakmuran (Gondwe dalam Mas'ood, 2003: 26). Tentu saat masa mengarah ke perkembangan yang lebih maju, membuat ada nya suatu pendekatan antara dan kerjasama yang akan membuat suatu keuntungan yang membuat individual mendapat keuntungan, dan juga menjalankan jaringan yang seadanya atau harus di ubah atas dasar hubungan kekuatan.

Ekonomi melihat keuntungan berskala individu atau otoriter dan apa yang dilakukan dengan senang hati atau suka sama suka. oleh sebab itu politik menghendaki ada nya transsaksi *power to coerce*. negara mempunyai sumber daya utama yang di miliki perorangan lain nya, ialah power legalitas dan hak untuk membuat harus melakukannya. Sebuah negara mempunyai kekuatan mengatur dan menerapkan berbagai hal yang digunakan untuk kebaikan ekonomi negaranya (Rachbini, 2004: 13 – 16). Dengan demikian situasi

ekonomi dapat dilakukan individu ataupun substansi negara, pada masa sebelum rovormasi dimana harta benda nasional dominan berapa padaa orang kaya yang mempunyai relasi dengan elit politik.

Misalnya, Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN dibentuk serta dikelola oleh Negara di bidang bisnis dan industrial yang bertujuan untuk membantu perekonomian serta membantu mengatasi jumlah pengangguran. Proses konsolidasi BUMN yang dibawah pengawasan dari Kementerian BUMN yaitu dengan gabungan antara dua cabang perusahaan menjadi satu ke kantor utama BUMN ke perusahaan satu ke lainnya agar menjadi lebih mudah. Di BUMN juga diharuskan adanya kesetaraan agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam pelaksanaan berbisnis (Akadun, 2007:71).

Ajaran-ajaran BUMN pada bidang ekonomi mementingkan kemakmuran masyarakatnya maka sebab itu diciptakannya BUMN karna alasannya untuk melayani serta untuk kemakmuran masyarakat. (Suriatmadja,1946:2). Artinya, prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yaitu agar tidak hanya untuk mencari keuntungan dan mengutamakan sifat social karna BUMN salah satu penghasilan Negara dan mengatur kebijakan teknisnya selama BUMN terus menerus berjalan, serta usaha yang bersifat tetap seperti Perjan,Perum,dan Persero. Adapun prinsip-prinsip dari badan usaha swasta yaitu mempunyai tujuan mencari keuntungan agar mendapatkan usaha yang bertkembang karena bentuk badan usaha selalu disesuaikan dengan besarnya pengeluaran modal, dan modal usaha itu diatur oleh swasta sendiri agar menjamin kontinuitas perusahaannya serta kerja sama dengan pihak asing berjalan dengan lancar.

Dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN memiliki Lima prinsip yaitu menyiapkan lapangan kerja untuk masyarakat agar

tingkat pengangguran tidak bertambah, memberikan bantuan untuk masyarakat yang mempunyai usaha yang lemah, memberikan sumbangan yang belum dilaksanakan oleh koperasi dalam melayani masyarakat dengan maksimal serta ,menjadikan sumber pendapatan dari non pajak untuk mengisi kas Negara.

Kemudian, adanya privatisasi yang bertujuan dari sisi ekonomi juga memiliki nilai positif, memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan ini memiliki tujuan agar setiap industri memiliki laba yang maksimal, dari sisi ekonomi juga memiliki nilai positif, memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan ini memiliki tujuan agar setiap industri memiliki laba yang maksimal. Metode negara dalam privatisasi khususnya pada BUMN dengan cara sebagian dari keseluruhannya atau seluruhnya, tujuan dari penawaran ini adalah agar BUMN terus bekerja dan berlanjut. Jika pemerintah hanya menjual sebagian saja maka perusahaannya akan menjadi perusahaan patungan antar pemerintah dan swasta, langkah pemerintah membuat perusahaan swasta ini agar BUMN masih bisa diawasi atau dikontrol kinerjanya sebelum diserahkan secara keseluruhan perusahaan ini.

Penjualan dengan cara ini adalah penjualan dalam bentuk strategi sedangkan pembelinya disebut investor strategi. Penjualan ini dilakukan dengan cara pemerintah menjual saham kepada seseorang (individu) atau kelompok. Hal tersebut dilakukan agar kinerja perusahaan semakin baik tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Metode privatisasi tersebut di ambil dengan keputusan yang terbaik dari pemerintah pemerintah lebih memilih metode yang mana, tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya hasil yang akan didapat (Labib, 2005: 22-25).

Adapun yang mendukung adanya privatisasi ialah, Masyarakat

menilai kinerja dari BUMN sebagai perusahaan yang tidak mementingkan publik, kinerja serta pelayanannya yang tidak maksimal itu yang membuat masyarakat memberi pandangan negatif terhadap BUMN, penyebabnya karena BUMN menganggap dirinya tidak memiliki pesaing dipasar produk sehingga anggapan mereka seburuk apapun pelayanan mereka masyarakat akan tetap datang karena membutuhkannya. Hal tersebut yang membuat pandangan buruk oleh masyarakat kepada BUMN. Cara pandang masyarakat tersebut akan berubah jika BUMN meningkatkan kinerja serta pelayanannya menjadi lebih baik atau maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus meberikan langkah privatisasi kepada BUMN agar lepas kendali dari pemerintah, dengan cara seperti itu mungkin BUMN dapat memberikan yang terbaik baik di baraaang maupun jasa (Labib, 2005: 44).

Dengan kata lain, Privatisasi artinya menjual saham atau perusahaannya kepada pihak swasta dengan tujuan agar pelayanan serta kinerja BUMN itu sendiri menjadi lebih maksimal karena tidak adanya campur tangan dari pemerintah lagi, sehingga diharapkan BUMN dapat mengatasi kekurangan anggaran belanja negara, diharapkan juga BUMN bisa memberi kemajuan dalam penggunaan (efisien) sumber daya (Labib, 2005: 46). Isu-isu pasar modal sangat sensitif terhadap perkembangan di sektor ekonomi terutama pada sektor ekonomi, politik, dan keamanan baik domestik maupun global. Disini dimaksudkan adalah pasar modal yang berkembang di sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Tidak hanya pada sektor ekonomi saja tetapi pasar modal juga mempengaruhi sektor politik dan keamanan sebuah negara. Beberapa isu tersebut adalah kebijakan *Federal Reserve* yang menaikkan suku bunga, brexit hingga kebijakan pemerintah.

Setelah saham pada pasar modal tumbuh signifikan akibat sentimen tax amnesty, IHSG turun karena terpengaruh sentimen dari America Serikat, kondisi ini menunjukkan pasar modal sangat sensitif terhadap isu-isu tersebut (Hartono, 2000:99).

1.2. Perkembangan hubungan Negara dengan masyarakat di bidang perekonomian.

Ilmu politik dan ekonomi adalah disiplin ilmu yang berbeda di zaman kuno yang paling dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran gagasan dan gagasan yang akan digunakan pada abad ke-18 dan ke-19 untuk mendorong dan meningkatkan kemakmuran negara Inggris dalam menghadapi Portugis dan negara lain. Ilmu-ilmu, yaitu ilmu politik dan ekonomi, secara bersama-sama mengkhususkan diri dalam pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan secara umum (Budiardjo, 2008:32).

Negara adalah wilayah atau entitas dengan otoritas nyata tertinggi, legitimasi dan loyalitas serta kepatuhan dari semua orang. (Budiardjo, 2008:17). Pengenalan politik berarti studi tentang suatu Negara dan apa yang ada di Negara itu, baik itu sejarah, tanda-tanda Negara itu atau aspirasi Negara itu, adalah ilmu politik. Hubungan negara dengan perekonomian adalah intinya saling menjaga atau mempertahankan segala hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan menjaga barang-barang milik halayak ramai dan agar tetap dalam situasi masyarakat.

1.3. Perubahan struktur ekonomi global dan nasional.

Berubahnya keadaan ekonomi di setiap negara dapat memengaruhi pengembangan kesejahteraan negara tersebut ke arah

posisi perkapita suatu negara semakin tinggi maka peran sektor pertanian akan menurun, sedangkan peran sektor manufaktur dan jasa akan meningkat. Sebenarnya sektor pertanian akan memajukan negara dengan mengeksplor hasil pertanian yang ada. Secara garis besar, sebelum melangkah menuju tahapan pertumbuhan yang seimbang, tahapan-tahapan yang biasanya dilalui dalam pembangunan suatu negara atau wilayah dimulai dari tahapan kecil.

Tidak hanya mempelajari peningkatan output orang yang dipekerjakan di berbagai sektor, tetapi juga melihat perubahan bantuan dari berbagai sektor terhadap pendapatan nasional negara. Peran yang berkembang dari berbagai sektor manufaktur dalam menyediakan peluang kerja. Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja, sedangkan sektor manufaktur sebagai perbandingan ditandai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan posisi upaya membangun pembangunan nasional, bergantung pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang tinggal di negara tersebut. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pertumbuhan pendapatan suatu daerah maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Pergeseran struktur ekonomi tersebut juga terlihat pada perubahan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana sektor tersebut dapat dibagi menjadi sembilan sektor dan dikelompokkan menjadi tiga sektor dalam laporan ini, yaitu sektor primer, Tersier, dan sekunder.

Terjadinya perubahan struktur ekonomi yang tidak baik berdampak

besar pada perekonomian yaitu semakin banyaknya pengangguran yang terjadi dan disebabkan karena perubahan kebutuhan ekonomi tersebut. Banyaknya gangguan disebabkan karena tidak sesuainya kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki dengan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Secara umum, fase transisi banyak dihadapi oleh negara berkembang karena adanya pergeseran struktur ekonomi, salah satunya Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan negara-negara maju menghadapi masalah pekerjaan. Masalah lain yang sulit, yaitu kurangnya sumber daya dengan banyaknya jumlah lowongan kerja, membuat masalah ini sulit diselesaikan (Jhinghan, 1999:519).

Kita hidup di dunia sejak 1993 Di negara-negara industri blok barat dan timur, 26 persen populasi mendominasi lebih dari 78 persen produksi, 81 persen penggunaan energi, 70 persen pupuk, dan 87 persen senjata dunia. Sementara itu, di negara-negara berkembang, 74 persen populasi dunia (di Afrika, Asia dan Amerika Latin) memperoleh sekitar seperlima dari pembangunan dan kekayaan dunia. Ketertinggalan negara berkembang juga terlihat dari pilar iklim yang berada di ambang kehancuran. Sebelum era kolonial Belanda, hingga 42 persen dari total jumlah hutan tropis di dunia hilang tanpa ada perubahan Ada sekitar 72 persen di Afrika Barat dan Afrika Timur dan 45 persen di Afrika Tengah dan 37 persen di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sekitar 63 persen hutan di daerah padat penduduk seperti Asia Selatan punah di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina) Sekitar 38 persen (Strahm,1993:63).

Kebakaran hutan Kalimantan, berkontribusi pada kerusakan hutan tropis, yang terus berlangsung terus menerus (Ruslin, 2012:120). Karena efek dari krisis hutang internasional, ketertinggalan dunia ketiga semakin parah. Tidak ada pengaruh lain di negara dunia ketiga yang lebih berpengaruh selain utang luar negerinya dalam perubahan ekonomi politik. Pasalnya, politik negara berkembang yang menjual barang yang mereka ekspor secara kredit menjadi faktor utama utang negara dunia ketiga.

Lebih lanjut globalisasi tidak datang dengan segera, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan sulit. Paling tidak, sejak 1947, ketika GATT (General Trade Tariff Agreement) dimulai, konsep globalisasi yang bertumpu pada pasar bebas telah terbentuk. Secara historis, era ini diawali dan diwarnai oleh perekonomian negara-negara maju yang semakin makmur, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga mereka mulai merasa perlu untuk memperluas kawasan ke negara-negara berkembang. Jika setiap negara masih diberikan kekuasaannya sendiri untuk melindungi barang dan jasa yang dihasilkannya, yang merupakan ciri warisan rezim merkantilis, ekspansi ini jelas sulit dilakukan.

Globalisasi didorong dengan anggapan ini sebagai bentuk perdagangan internasional di mana kekuasaan untuk mengontrol negara atas perekonomian domestik disempitkan dan dibatasi. Dengan kata lain, negara hanya mengurus masalah non-ekonomi, sedangkan organisasi asing, termasuk WTO dan IMF, memperhatikan sepenuhnya masalah ekonomi (perdagangan internasional). Maka tidak mengherankan jika pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri untuk pertumbuhan ekonomi negara dunia ketiga telah menjadi momok .

Masalah pinjaman luar negeri dipandang sebagai penyebab utama ketertinggalan negara dunia ketiga oleh banyak sumber yang meneliti perkembangan di negara berkembang. Hutang luar negeri menghadapi berbagai ancaman, termasuk melebarnya jurang pemisah antara negara miskin selatan dan negara kaya utara, pemiskinan penduduk dunia ketiga, dan sebagai bentuk baru kolonialisme.

Pemerintahan Indonesia hutang luar negeri telah digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menangkal langka masalah modal keuangan. Selain itu, utang luar negeri juga digunakan mengatasi kesenjangan ekspor-impor dan masalah kelompok fiskal. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa orang Indonesia asing posisi utang pada Agustus 2016 mencapai US \$ 323 miliar, atau setara dengan Rp4,215,6 miliar (rate Rp13.051 / USD). Meskipun demikian, 49,4% merupakan hutang pemerintah yang mana mencapai US \$ 159,7 miliar atau setara dengan Rp2,084 miliar (Bank Indonesia, 2016).

Menurut Mas'ood (1990), efek politik juga dikemas diantara kalangan dependen, bahwa kehadiran penetrasi internasional ke dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara pinggiran akan memperlambat munculnya demokrasi liberal, keberadaannya justru akan semakin menyebabkan penguatan kediktatoran. Dimana, sebagai aktor yang sangat terlibat bersama untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, birokrasi negara mengatur pemerintahan dan bisnis negara yang menguasai sektor bisnis yang berbeda.

Namun kehadiran teori ketergantungan, khususnya dari kalangan sosial liberal dan kalangan Marxisme, mulai mendapat perhatian dan kritik dalam perkembangannya. Teori ketergantungan juga menganut dirinya sendiri (Ruslin, 2012: 121).

Salah satu kritik terhadap teori ketergantungan dan keterbelakangan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara dunia ketiga, khususnya New Industrializing Countries (NICs), tidak dapat diperhitungkan (Browet, 1986: 43). Kritik Dependencia didukung oleh keberhasilan negara-negara berkembang baru seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong. Bill Warren, yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Imperialism: a founder of capitalism*, mengkritik keras Dependencia, yaitu kenyataan bahwa negara yang bergantung menunjukkan keberhasilannya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri serta bergerak ke arah pembangunan yang mandiri. Selain itu, atas dasar kapitalisme, ia juga mendukung Marxisme. Ini tidak bisa lagi dihindari dan seluruh dunia telah diserbu, baru kemudian reformasi dalam sosialisme akhirnya digunakan (Budiman, 1995: 102).

Ketergantungan nampaknya semakin meresahkan karena ketika unsur-unsur cara pandang, gaya hidup, kebiasaan konsumsi dan sebagainya telah menggantikan “kemerdekaan” suatu bangsa dengan melihat pola budaya negara berkembang, hal tersebut juga berpengaruh pada pergeseran nilai. Beberapa negara berkembang mengalami upaya masuk yang dalam dan bergantung pada negara maju. Selain ekonomi, politik dan budaya, upaya masuk yang mendalam ini kini menjadi kebiasaan yang dapat mengubah nilai, upaya masuk secara mendalam melalui politik dan budaya, banyaknya aliran pengetahuan dan kompleksitas telekomunikasi, melalui banyak konten atau simbolik. paket, seperti buku, acara televisi, internet, ini mempengaruhi pola berpikir, perilaku, kepercayaan, dan sebagainya.

Kemampuan berpadu dengan budaya barat ini, berdasarkan pengalaman banyak negara pinggiran, telah membuat banyak orang merasakan kemerosotan nilai budaya mereka sendiri. Munculnya konsumerisme di kalangan elit dan kelas menengah adalah yang paling terlihat. Produk konsumen yang lebih mewah yang membutuhkan teknologi impor, seperti AC dan telepon seluler, diproduksi oleh pengusaha lokal. Pasar yang menysasar konsumen kelas atas sangat sempit, karena ukurannya lebih kecil, tetapi memiliki daya beli tinggi. Oleh karena itu, pengusaha lokal memiliki ketertarikan untuk memperluas prospek bisnis kelas atas dan tidak tertarik untuk memperluas pasar kelas menengah atau bawah. Situasi ini mengakibatkan ketidakadilan sosial.

Ada versi modern ketergantungan yang mempengaruhi tidak hanya pasar ekonomi, tetapi juga pergeseran cita-cita budaya dan tren konsumeris yang dikombinasikan dengan budaya Barat. Menurunkan "kemerdekaan" bangsa secara bertahap dalam menentukan tanggapan selanjutnya. Ruslin (2012: 122) Ketimpangan distribusi pendapatan sangat rentan terhadap pemicu konflik, karena beberapa kelompok akan menganggap bahwa kelompok lain akan mendapatkan bagian yang lebih besar jika mereka sendiri memperoleh lebih sedikit. Gangguan ini juga bisa menjadi penyebab banyaknya kejahatan yang muncul karena kemiskinan. Dan hal ini memungkinkan pertumbuhan standar kesejahteraan sosial dan politik.

Banyak individu, termasuk ekonom Barat, baru-baru ini mulai tertarik pada struktur ekonomi yang disediakan oleh Islam sebagai basis fundamental bagi aturan baru ekonomi dunia. Ia menegaskan, menurut Ibnu Mariam, regulasi baru yang dibutuhkan harus tercermin di dalam Keadilan, perspektif yang sama tentang orang dan moral,

Sehinga sesuai aturan perekonomian yang telah ditentukan islam berlandaskan fondasi kokoh, meliputi ketauhidan, khilafah, dan keadilan.

1.4. Politik dalam Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mendorong pendekatan dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah Nilai dari Lingkungan. Sampai pada saat ini tidak ada kejelasan mengenai kerusakan lingkungan dari hasil mendapatkan ekonomi. Sebenarnya akan sangat penting untk diketahui untuk menimbang untung rugi dari hasil kerusakan hutan tersebut. Sebenarnya ada angka yang membahas akan hal ini namun hanya berupa jumlah hasil produksi dan berapa banyak nilai yang di hasilkan untuk memperbaiki kerusakanya. Hal ini tentu membuat banyak pertanyaan seberapa banyak nilai ekonomi yang dimanfaatkan untuk meperbaiki kerusakan lingkungan? Dan apa mamfaat kalau lingkungan itu di jaga? (Damayanti,2009:96).

Pengertian makna yang disepakati dalam literatur ilmu sosial sebagai skema yang sesuai merupakan produk dari faktor perilaku. Kerugian yang paling sederhana dari nilai adalah adanya kesepakatan yang berbeda antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan. Kepribadian sosial dari suatu struktur sosial budaya merupakan suatu kebutuhan dalam pengorganisasian kebutuhan, pertimbangan untuk kepentingan lain, bagi suatu komunitas masyarakat sebagai suatu kehidupan sosial yang luas. Nilai-nilai disusun secara hierarkis dan mengontrol rangsangan kepuasan dalam mencapai tujuan kepribadiannya. (Damayanti,2009:98).

Ada sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dimana jika dia memiliki posisi diatas maka dia akan memiliki apapun yang diatas. Keberhasilan penggunaan posisi ini cenderung membuat

orang tersebut membuat sebuah struktur kekuasaan dan peran dari yang dibawah akan sangat penting dan akan patuh dengan yang memiliki kekuasaan diatas.namun sistem ini aka nada hanya ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi (Mas'oad, 2003: 30 - 36).

Kedua, Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Negara dengan mengandalkan kekuasaan cenderung dengan pemerintahan seorang yang dictator yeang miliki sikap otoriter sehingga mendapat hasil hukum yang mementngkan pihaknya dan mebuat orang hilang kebebasan (Damayanti,2009:97). Kebijakan yang dibuat oleh elit politik akan sangat berpengaruh dengan hasil yangkana didapatkan. Oleh karena itu segala sesuatu harus di perhitungkan dengan sangat matang. Sebuah kebijakan yang baik lahir dari penerapan dan perhitungan. Sebab biasanya pembuatan kebijakan biasanya berpikir bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terstruktur dan beri petunjuk yang baik. (Damayanti,2009:98).

Anthony, Dearden dan Grovindarajan setuju bahwa tiga elemen berbeda dari perencanaan, mekanisme kontrol adalah strategi, kontrol manajemen, kontrol tugas, tetapi masing-masing terkait erat. Regulasi manajemen, menurut mereka, merupakan mekanisme yang digunakan oleh administrator untuk memanipulasi anggota organisasinya untuk menjalankan strategi organisasi. Menurutny, pelaksanaan rencana yang efisien merupakan bidang yang tepat untuk sistem pengendalian manajemen. Maciariello dan Kirby menyatakan bahwa sudut pandang Anthony dan rekan-rekannya tidak boleh menganggap adaptasi dan kreativitas sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol manajemen ekonomi. (Andrain,1992:230–232).

Pada bidang ekonomi pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang berlangsung. Di tambah lagi pada sector pasar dan pemerintah memiliki hubungan yang komplementer dimana pemerintah sebagai hal yang melakukan tindakan ekonomi yang menjaga agar semuanya terkendali dan menjadi teratur.tidak hanya disisi sector ekonomi pemerintah juga dituntut dengan hal yang lain diantaranya pembangunan sarana dan prasarana (Damayanti,2009:99).

RANGKUMAN

Politik dalam Ekonomi, Ada beberapa faktor yang mendorong pendekatan dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah Nilai dari Lingkungan. Sampai pada saat ini tidak ada kejelasan mengenai kerusakan lingkungan dari hasil mendapatkan ekonomi. Sebenarnya akan sangat penting untuk diketahui untuk menimbang untung rugi dari hasil kerusakan hutan tersebut.

Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara, tidak dapat dilepaskan pengaruhnya dengan jalannya suatu negara yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan merupakan kapasitas dalam suatu interaksi sosial, melihat kearifan dan kehidupan ekonomi melalui strategi kedaulatan bermakna memakai strategi ekonomi politik. Negara mempunyai peran untuk menjaga peninggalan kekayaan dan menjaga lingkungan untuk diwarisi ke generasi selanjutnya untuk kenyamanan generasinya dalam urusan ekonomi. Sedang pada sisi konsumsi rumah tangga mereka menikmati hasil yang sudah dibuat dan bagaimana menghasilkan yang maksimal dari hal itu.

Misalnya, Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN dibentuk serta dikelola oleh Negara di bidang bisnis dan industrial yang bertujuan untuk membantu perekonomian serta membantu mengatasi jumlah pengangguran. Sementara Perkembangan hubungan Negara dengan masyarakat di bidang perekonomian sendiri antara ilmu politik dan ekonomi adalah

ilmu yang tersendiri yang lebih di kenal sebagai ekonomi politik , yaitu pemikiran ide dan gagasan untuk di gunakan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan negara inggris dalam menghadapi negara portugis dan negara-negara lain pada abad ke 18 dan 19. Jalannya suatu negara dapat dikatakan bahwa ekonomi politik juga berjalan.

Perubahan sistem ekonomi global dan nasional Perubahan struktur ekonomi masing-masing negara berdampak pada perekonomian negara tersebut dalam proses pertumbuhan. Jika posisi perkapita suatu negara semakin tinggi maka peran sektor pertanian akan menurun, sedangkan peran sektor manufaktur dan jasa akan meningkat. Sektor pertanian berpotensi memajukan negara melalui ekspor produk pertanian yang ada. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang biasanya dilalui dalam suatu negara atau wilayah pembangunan dimulai dari tahapan kecil sebelum berjalan tahap perkembangan yang seimbang.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Jelaskan implikasi ekonomi politik terhadap negara menurut Labib ? berikan contohnya !
2. Jelaskan bagaimana peran ekonomi politik dalam negara ?
3. Jelaskan hubungan negara dengan masyarakat menurut Budiardjo ? berikan contohnya !
4. Jelaskan perubahan struktur dan ekonomi global menurut Jhinghan ? berikan contohnya !
5. Jelaskan posisi politik dalam ekonomi menurut penjelasan Damayanti ?

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara

Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum perkuliahan
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

Formulir No 2

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, Charles F.1992.”Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial”,
Yogyakarta : Tiara Wacana
- Akadun. M. Pd, 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta :
Bandung
- Bank Indonesia. (2016), Annual Report of Bank Indonesia. Jakarta:
BI.
- Budiman,Arief.1995.”*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*”.Jakarta;
PT Gramedia
- Budiardjo, miriam, 2008, dasar-dasar ilmu politik, jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama.
- Browet, John, “ The Newly Industrializing Countries and Radical
Theories of
- Damayanti, Christy.2009.”Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi”.
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.9 No.1
- Hartono, Sri redjeki, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*,
Mandar Maju : Bandung
- Jhingan ,M.L.1999, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan,
Terjemahan , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Labib, Rahmat S, 2005. *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, Wadi
Press : Jakarta

- Mas' oed, Muhtar, 2003, *Ekonomi Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rachbini, Didik J.2004."Ekonomi Politik".Jakarta : Granit
- Ruslin.2012."Relasi Ekonomi Politik dalam Perspektif Dependencia". Sulesana Vol.7 No.2
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia*, graha ilmu : Yogyakarta
- Strahm, Rudolf H.1999."*Kemiskinan Dunia Ketiga*". Jakarta; Pustaka Cidesindo
- Suriatmadja, Arifin, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan*, PT. Gramedia : Jakarta

BAB V

ISU EKONOMI

POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memperoleh isu ekonomi politik
2. Memperoleh isu bisnis dalam ekonomi politik

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang isu dalam ekonomi politik beserta contohnya yang memuat kelemahan implementasi dan tantangan pengelolaan dan memperoleh isu bisnis dalam ekonomi politik.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab V dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

1.1. Isu Ekonomi Politik

Di era pasca Orde Baru, eskalasi konflik terus berputar di sekitar dampak positif dan negatif dari pemerintahan yang agak liberal. Dampak positifnya berupa akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pertambangan dan perdagangan, sehingga pascakrisis dan jatuhnya harga lada sebagai produk mapan lainnya, secara langsung meningkatkan kemakmuran dan efek domino perekonomian yang tinggi (Erman, 2010: 72).

Menurut laporan tersebut, penyebab kerugian ini adalah jangka waktu yang lama dan sumber daya fisik dan non fisik yang sangat besar, yang dihitung lebih tinggi dari nilai manfaat sistem perdagangan timah, dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Mereka yang mengandalkan wilayah pesisir kurang dari 4 km dari bibir pantai untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya dengan alat dan metode sederhana sangat bergantung pada perlindungan lingkungan laut, berkumpulnya nelayan peserta Forum Nelayan Bangka (Untuk Nebak) di Bangka sedang mengkonsolidasikan sesama nelayan di Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasinya. Melalui surat bertanggal 18/01/2016 dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, No 540/40 / DPE / 2016, perihal jalannya aksi penghentian sementara penolakan yang diperoleh dari masyarakat pesisir di sana, masyarakat meminta kepada Gubernur. membatalkan semua jenis pertambangan laut, mencabut IUP pertambangan laut, mengatur tata ruang, melakukan renovasi operasi pertambangan bekas laut, Koalisi untuk menang (Pratama, 2016: 41-42).

Sejak reformasi dilaksanakan, struktur pengelolaan timah baru di bawah rezim Bupati telah melahirkan 'Negeri Bayangan'. Negara bayangan lokal ditentukan oleh kehadiran para pelaku ekonomi informal dari lembaga negara di tingkat lokal (Pratama, 2016: 42).

PT Timah, sebagai instrumen perekonomian negara, di satu sisi pemegang status quo hak tambang luas berdasarkan kebijakan lama, berpendapat bahwa kedua belah pihak memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan sumber daya timah, (Pratama, 2016:42) Meski sama-sama bermuara pada tujuan terciptanya persamaan hak dalam hal terkait politik, akuntabilitas setempat, dan hak untuk dapat di dengar, Namun, kedua metode tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Opsi pertama adalah meningkatkan kewenangan dan keterlibatan warga di tingkat lokal dalam demokratisasi, sedangkan opsi kedua adalah lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya untuk bekerja demi efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Disorientasi di tingkat kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Resistensi terhadap sentralisasi pengelolaan sumber daya timah bermula dari ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengembalikan kekayaan alam tersebut ke Bangka Belitung terlebih dahulu dalam bentuk redistribusi kekayaan (Ibrahim, 2013: 123-126). Dalam situasi ini, tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan negara dengan masyarakat atau komunitas. Oleh karena itu, perlu diciptakan kesan bahwa desentralisasi, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya, hanyalah sarana atau instrumen interaksi yang kompleks antara keduanya, dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat di daerah.

Pihak tersebut merupakan perusahaan mitra yang tidak mampu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak pengusahaan pertambangan KIP di KP PT Timah Marine atau pihak swasta yang tidak bermitra dengan PT Timah tetapi saat ini sedang dan sedang mencari IUP pertambangan laut. dari Pemerintah Provinsi di luar PT Timah KP atau bisa menjadi swasta dengan kedua karakteristik tersebut. Ini bukan peran utama lapangan ini, melainkan bagian dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Provinsi Bangka. Ini juga yang menjadi alasan mengapa SPS ini terhambat pada tahap implementasi dan tidak berhasil. Pemprov Bangka Belitung menunjukkan dominasinya berdasarkan kewenangan otonomi daerah, PT Timah menunjukkan kekuatannya sebagai BUMN. Kajian tentang ekonomi politik neoklasik kemudian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterlambatan di negara-negara tersebut adalah ulah para aktor negara dan aktor masyarakat. Asumsinya adalah bahwa regulator dan kontrol atas aliran keuntungan dan pemerintahan adalah siapa pun yang dapat menjadi pelindung untuk mengontrol transisi, mengontrol distribusi keuntungan melalui kontrol atas kebijakan pemerintahan, serta memegang kekuasaan untuk mengatur akses dan kontrol atas kaleng (Pratama, 2016: 44).

Tidak diragukan lagi bahwa media massa dipenuhi dengan ancaman dukungan kolektif untuk bertindak. Perdebatan antara elit terkait keputusan ini juga terlibat, belum lagi Polemik suspensi sementara ini diwarnai.

Proses penambangan laut tidak bijak dan emosional harus dihentikan. Dimana pemerintah dan masyarakat di daerah secara aktif menuntut haknya untuk menikmati ekstraksi timah, maka pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah seberapa kompleks mekanisme penerbitan Keputusan Gubernur tentang penghentian sementara operasional KIP PT Timah di tiga wilayah. daerah pertambangan yang tidak stabil? Artinya, sebagai ringkasan dari makna hukum dan ilegal yang ambigu dalam komunitas pertambangan dan perdagangan timah Bangka Belitung (Pratama, 2016).

Perekonomian informal terkait dengan pengaturan ekstraksi sumber daya timah, yang kemudian juga berdampak signifikan terhadap perkembangan konfigurasi politik di tingkat lokasi. Oleh karena itu, untuk alasan di atas, setiap pilihan yang terjadi harus diperhitungkan dan dipetakan oleh para aktornya, sehingga pada dasarnya dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat kepentingan para aktor tersebut, yang menjadi motif utama dalam pengambilan keputusan alternatif atau kebijakan publik. Keyakinan bahwa orang seharusnya didorong oleh kepentingan pribadi dan siap melakukan perdagangan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, sementara mereka memegang sejumlah posisi politik yang berbeda, tanpa kecuali.

Respon tersebut diwujudkan dengan keluarnya kebijakan penghentian sementara izin operasional penambangan timah menggunakan kapal keruk dan KIP, demonstrasi tertib yang dilakukan oleh nelayan di Bangka yang berlangsung selama 5 jam dan berhasil mencuri perhatian elit politik dan masyarakat. (Pratama, 2016).

1.1.1. Kelemahan Implementasi

Situasi ini merupakan tantangan terbesar bagi kelangsungan hidup nelayan sejati. Karena fakta bahwa kedua sektor ini (pariwisata pesisir dan bahari) berlangsung di wilayah yang sama, tetapi kontraproduktif, pertambangan tidak mampu menyelaraskan secara damai dengan operasi kelautan dan perikanan, sementara keterlibatan yang buruk dan inkonsistensi akut. penyakit yang sering memengaruhi perilaku. Namun pelaku ekonomi dan politik di Indonesia lebih memilih untuk mengorbankan nyawa nelayan pesisir yang dirugikan oleh eksternalitas negatif penambangan timah laut, meskipun sektor ini belum memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan daerah karena faktor yang berbeda.

Juga bukan pilihan yang menyenangkan. Realitas ini jelas merugikan gerakan penghijauan dan kesadaran ekologis yang saat ini digalakkan oleh pemerintah daerah. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di Teluk Kelabat dan Laut Tempilang penambangan masih berlangsung, baik oleh PT Timah maupun dioperasikan oleh perusahaan mitra yang masih aktif, meski angkanya tidak besar. Selanjutnya, dampak dari TI terapung dan menara IT ilegal yang masih membayangi KIP, serta temuan wawancara dengan karyawan R, Babel Distamben, Hambatan dan kontra regulasi antara kekuatan Golkar dan PDIP ditunjukkan oleh agen dan aktor baik di struktur pemerintahan maupun yang dibentuk di masyarakat oleh anggota tim studi literatur tesis ini (Pratama, 2016: 47-48). Sulit untuk memetakan konfigurasi pro dan kontra pertambangan laut Karena masih banyak sikap para pelaku dalam isu pertambangan.

Tentunya bukan orang biasa dan sembarangan dalam penambangan laut oleh pihak swasta atau pengusaha yang menjalankan perusahaannya. Mengingat investasi yang diperlukan untuk memperoleh kapal keruk produksi dan kapal hisap, maka diperlukan investasi yang sangat besar. Pengendalian sulit dilakukan karena aturan local shadow state masih bercokol dan mendominasi semua lini stakeholder. Realitas ini diyakini terjadi setelah meninggalnya Eko Maulana Ali sebagai pelindung dan pengatur karena mafia bisnis timah yang sangat terpecah-pecah menjadi faksi yang berbeda. Satu pintu bisnis timah abu-abu (Erman, 2007: 242-256).

1.1.2. Tantangan Tata Kelola Timah

Dibandingkan dengan pengembangan potensi perikanan laut dan pesisir, keuntungan besar dari industri timah, baik legal maupun ilegal, bahkan lebih menarik untuk dicari oleh para pelaku terkait dibandingkan dengan pengembangan potensi perikanan laut dan pesisir yang nyata. studi penilaian tidak pernah dilakukan terhadap pasar, politisi dan birokrat yang masih menikmati keuntungan ekonomi politik yang signifikan. Tekanan dan tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menyebabkan kebijakan penghentian sebentar pengoperasian kapal keruk dan pengisap keluaran. Di daerah yang menentang penambangan laut, PT Timah berada (Pratama, 2016: 50).

Untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan iklim laut yang

Mempunyai kekuatan yang lebih kuat dan lebih luas serta upaya yang lebih sistematis. Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ini harus bekerja sama untuk mewujudkan visi tata kelola pertambangan timah yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menjumlahkan keinginan-keinginan yang secara rasional menjadi pilihan rasional dalam keputusan / kebijakan publik yang dapat dipilih. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengeluarkan protes setengah tinggi Secara umum, politisi masih menolak berbicara tentang kesadaran ekologis dalam debat timah.

Adanya pemimpin yang berani secara gamblang dan frontal memihak tuntutan masyarakat nelayan yang memprotes dan resisten terhadap penambangan pesisir, ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang memiliki eksternalitas positif bagi masyarakat. Semua. Tekanan dan regulasi terhadap pemerintah dan pelaku usaha pertambangan timah laut harus tetap menjadi perhatian utama agar para politisi yang mengejar kendali sendiri, serta mereka yang mengadvokasi secara membabi buta melakukan penambangan laut, tidak melampaui keserakahan, kelalaian dan ketidakpedulian.

Selain itu, dalam situasi ini, para pelaku kebijakan lebih cenderung untuk mengoptimalkan berbagai keuntungan yang munafik dan ambivalen untuk tetap dapat mengontrol akses kepada semua aktor yang terlibat dalam ekonomi politik, akses perdagangan juga dimungkinkan untuk memaksimalkan derajat kepuasan dan untuk meningkatkan kendali atas pengaruh. Perebutan kekuasaan dalam sengketa timah ini, akses ada di tingkat dan minat yang lebih berbeda,

banyak wajah, tumpang tindih dan saling memangsa dalam konteks eksploitasi timah, akses pertambangan dan aliran keuntungan masih hanya dinikmati oleh para politisi, birokrat, aparat, aktivis dan aktor-aktor terbatas yang terkumpul dalam lingkaran kekuasaan politik saja,

1.2. Isu Bisnis Dalam Ekonomi Politik

Jika di lihat dari pengertian dari kedua aspek, istilah *politics* serta *business* memiliki perbedaan pengertian. *Politics* bermuladaripada suatu istilah yaitu “polis” yang didalam perbahaasaan negara yunani berartikota/negara. Oleh karena itu berubah jadi “politikos” yaitu menjelaskan sesuatu berkaitan dengan urusan-urusan negara atau kota. Budiardjo menuturkan (1982:8), politik merupakan segala sesuatu aktivitasdidalam satustruktur*politics* (atau negeri) yaitu berkaitan dengan cara penentuan banyak tujuan daripadastruktur tersebutkemudian menjalankanbanyak tujuanutu.

Sementara pengertian *business* yaitu suatu badanpenyedia barang-barang atau pelayananyang bermaksud lain untuk mendapatkan keuntungan Sehingga di peroleh kesimpulan yaitu sasaran *politics*ialah sebuah Negara/kawasan sedangkan sasaran suatu *business* yaitu sebuah perusahaan (Griffin dan Ebert, 2007: 4)

Ekonomi politik dapat di ajukan sebagai salah satu bahan dasar perbincangan tentang bisnis dan demokrasi.dalam perdebatan nya wacana ekonomi politik sendiri lahir dari asumsi kompromis antara ilmu politik dalam satu perspektif dalam ilmu ekonomi.untuk sampai pada topik actual yang akan di bahas dalam tulisan ini khusus nya bisnis dan demokrasi menggulas singkat pokok pokok ekonomi politik sebagai wacana sekira nya menarik di sampaikan. Studi ekonomi ialah satu dari ilmu/disiplin social yangmana menelaah kegiatan orang yangmana berkaitan sama pembuatan,perilakunya

orang didalam menentukan masalah ekonomi inti yang makmur adanya ketidak-imbangan dari keperluan manusianya yang tiada terpaku dengan segala yang berkaitan dengan kepuasan keinginan. Dalam ke uangan dan perdangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter (Heriyono, 2013:97-98).

Akan tetapi dalam berbagai aspek, politik dan bisnis justru banyak sekali kaitannya atau hubungannya. Hubungan kesatu, selaku suatu ilmu/studi. Jika *business* diasumsikan terkait didalam bagian pengkajian ilmu/studidiekonomi sehingga di sejarah hingga saat ini di temukan bidang/bagianstudi ekonomi yang terkait politik. Suatu bagian studitersebutberusaha menyatukan penganalisaan dari kebijakan dinegara untuk menaikkan tingkat kesejahteraannya masyarakat. Hingga saat ini ilmu/studi *politics&* ilmu/studi ekonominya berubah jadi bidang/bagianstudi yang terpisah meskipun demikian pengkajian studi ekonomi yang terkait politik terus terdapat hingga saat ini (Budiardjo, 1982:8). Hubungan yang kedua, suatu perusahaan yang menjadi organisasi suatu bisnis mempunyai beberapa faktor akan mempengaruhi dari luar organisasi yang di maksud lingkungan.

Kaitan *politics and business (social environment)*. Ruang lingkup pekerjaan adalah ruang lingkup yang banyak memberi pengaruh pada organisasi/badan dengan cara langsung misalnya, pemilik/yang memilikinya, pemasok/agen, pelanggan/konsumen serta para pekerja. Lain halnya dengan ruang lingkup umum/publik merupakan ruang lingkup yang memberikan efek yang secara tak langsung kepada organisasi/badan. Beberapa ruang lingkup secara tidak langsung (*so-cietal environment*) memberikan pengaruh terhadap organisasi/badan *business* yaitu ruang lingkup *politics*.

Interaksi sosial memiliki fungsi dan tujuan berinteraksi secara

sosial, hubungan/kaitan sosial yang secara dinamis/aktif melibatkan hubungan antar perorangan, tetapi sebutan ekonomi yang berkaitan dengan politik sebenarnya dasarnya kaitan dari ke-2 bidang/cakupan ekonomi serta *politics*, awalnya banyak berfokus pada ajaran tuk mengelola pemerintahan. tapi intinya didalam ajaran/ aspek ekonominya terdapat pentingnya perpolitikan. Kepentingan/ daya tarik *politics* memiliki kecenderungan tidak akan melemah pada tarikan ekonomi, dan biasanya menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Kata-kata yang bermula berdasarkan persamaan sering berkonsumsi, dari satu perbhasaan spesifik mengikuti system golongan semantik dalam hal linguistik berfungsi semata-mata untuk mempelajari arti kata-kata, untuk manajemen ekspor impor ini semakin dibutuhkan hampir seluruh dunia sebagai bisnis yang vital bagi Negara, maka Negara yang ditemukan di Negara ideology.

Dalam terlaksananya perkawinan/pernikahan sebuah lembaga/badan perkawinan/pernikahan yangmana mengurus hubungan antar suami-istri dalam hal yuridis ataupun religious yang nantinya hubungan itu sah/resmi dalam hal agama, hokum, serta tak terlanggar norma-norma hokum kelaziman setempat yang terdapat dimasyarakat, dalam melakukan aksi ekonomi sangat beragam akibat motif ekonomi yang dihasilkan berlatar belakang berbeda beda. Hubungan antar politik dan ekonomi yang hakekatnya ialah mengetahui hubungan timbale balik diantara kepentingan ekonomi, dan demikian orang kaya atau sudah bosan memiliki hartanya maka dia akan pindah ke arah politik (Heriyono, 2013:98).

Masalah tersebut adalah penyebab terjadinya turunnya ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap DPR banyak pengusaha yang menjadi legislator perlemen saat ini, untuk mengetahui apa sesungguhnya daya tarik menjadi anggota legislatif, saat calon (yang

belum menjadi) kepala daerah itu terpilih(menang) maka memudahkan ekonomi *business* proyek dan pengusaha dan motif/sebab diekonomi dan dipolitik ada 2hal yang tidak sama tapi mudah kalau di pisah kan karna ilmu-ilmu itu sering terjadinya hubungan yang sangat penting(Heriyono, 2013:98-99). Salah satu hal yang jarang disampaikan ialah bahwa ekonomi politik tersebut pada dasarnya dilandaskan dipemisahan dari ilmu-ilmu politik dan ilmu-ilmu ekonomi. Artinya jika keduanya digabungkan dari segi konsep, sebenarnya ekonmi politik tidak bisa dilihat sesuai penghubungan dari dua jenis/hal berbeda.

Dari pengertian tersebut, sebenarnya politik tidak benar-benar terpisah dengan ekonomi dan sebaliknya. Dapat dengan mudah ditemui adanya distribusi barang dan jasa dalam jalur politik dan sebaliknya adanya factor-faktor politik dalam mekanisme dan kelembagaan ekonomi. Ilmu-ilmu eknomi serta ilmu-ilmu politics berbeda dan terpisahkan dengan yang lain dalam hubungan analisa dan pendekatannya yang melekat didalam keduanya. Kontek teoritis diantara keduanya terkadang sudah ada dengan sendiri tergantung pokok permasalahan yang disampaikan. Fleksibilitas seperti ini pada akhirnya justru memberikan kontribusi kepada tiap-tiap perspektif untuk memperkaya diri didalam pendekatannya(Heriyono, 2013:99).

Bisnis dan demokrasi ialah contoh topik makro yang bisa dianalisis melewati pendekatan ekonomi dan politik. Demokrasi dalam analisis terkini umumnya memasuki permasalahan-permasalahan ekonomi, bahkan dalam hubungan mikro ekonomi sekalipun, sebagai bahan berperan besar mempengaruhi pertumbuhan suatu masyarakat. Demokrasi yang secara umum dikenal sebagai terkonep pemerintahan rakyat/masyarakat oleh rakyat/masyarakat

serta untuk rakyat/masyarakat didalam perspektif reppresentasi politik pemerintah dalam kesadaran terkini menjadikan ekonomi dan bisnis sebagai bagian utama yang berdampak besar. dalam analisis demokrasi, bisnis bahkan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur (dan bahkan pilar) berhasil tidaknya penerapan demokrasi pada suatu Negara. Dalam pandangan demokrasi ,bisnis menjadi ukuran bagaimana penerapan demokrasi yang dilaksanakan melewati kebijakan publik yang ditentukan oleh Negara. Begitu juga dalam pandangan sektor bisnis taip-tiap mempunyai ciri yang berbeda-beda dalam menempatkan posisi pilar demokrasi walau dapat ditarik kesamaan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan.

Dasar ekonomi politik dalam perbincangan tema bisnis dan demokrasi, menghasilkan proposi-proposisi (hipotesis) dalam menentukan tujuan terakhir melalui proses tukar sumber non-ekonomi (*politics social*) serta bersifat ekonomi. Jauh lebih penting adalah bagaimana sistem-sistem tersebut bias diperbaiki dandisempurnakan kinerjanya untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat (Heriyono, 2013:109-110).

Dengan mengakomodasi kajian semacam ini akan menjauhkan diri dari keterjebakan pengertian yang parsial. Analisa politik tidak dilaksanakan secara membabi-buta dengan tidak memperdulikan dimensi-dimensi lainnya yang secara nyata memberikan dampak besar. begitu juga dengan kajian ekonomi, tidak dapat bekerja dengan tidak memperdulikan factor-faktor politik terjadi (Heriyono, 2013:100).

Hubungan yang keempat, pelaku politik yang berasal dari aktor bisnis. Hal ini sering dijumpai di banyak negara seperti Indonesia. Sesudah Indonesia berada pada masa Orde Baru banyak aktor bisnis yang datang menghampiri. Jalan tersingkat adalah dengan menjabat

sebagai keanggotaan Golongan Karya (Golkar) untuk perpolitikan masa Orde-Baru. Sebagai anggota dari Partai perpolitikan maka harapannya bisnis bisa “terlindungi” berhasil serta apabila berbasis baik maka jabatannya dipolitik seperti Menteri akan diperoleh. Seperti yang dialami Bob Hasan, yang mana dilantik oleh Soeharto (mantan presiden) jadi Menteri Perindustrian Perdagangan dikabinet Soeharto th.1998 namun hanya menjabat selama dua bulan (Maret-Mei 1998) akibat lengsernya Soeharto dibulan Mei 1998.

1.2.1. Pergulatan Bisnis Politik Indonesia

Masa pelaksanaan Pemilihan presiden 2009 dahulu, SBY-Boediono di tuduh menjadi pengikut neo-liberalisme(neolib) oleh pesaing nya sepasang Mega - Prabowo yang mana pasangan terakhir ini melakukan untuk menarik simpati rakyat dengan mengumumkan pemahaman ekonomi terhadap rakyatnya. Kubu SBY dan Boediono menolak tuduhan tersebut dan mengatakan jika sebenarnya ‘mereka’ melaksanakan ekonomi-pasar namun sesuatu itu juga diterima secara baik oleh masyarakat. Perbisnis profesional mungkin akan mendorong SBY dan Boediono dikarenakan pebisnis umumnya akan suka terhadap ekonomi berbasis persaingan pasar-bebas. Walaupun terdapat pebisnis jadi ‘korban pasar-bebas’ berarti bisnis tersebut tidak berhasil, sehingga menjadikan pebisnis banyak yang sukses. Tentunya juga para-pebisnis mempertanyakan perekonomian rakyat yang mana prabowo katakan, itukah sosialisme?? Tidak salah mengenai prinsip-prinsip persaingan-pasar dan segala pihak-pihak ikut menjalankan berbagai aturan dan peraturan yang berlaku (Mubyarto, 1993:39)

Pebisnis menginginkan politikus serta yang lainnya, Perusahaan/industri merupakan organisasi *business* yang

tentunya tidak sendiri saja dijalankan. Masihlah ada serta terus tidak lepas sehingga terus bergantung pada berbagai hal. Perusahaan/industri membutuhkan pelanggan agar beli barang-barangnya. Perusahaan/industri butuh pemasokan barang-barang, perusahaan pasti butuh peranan pemerintahan selaku kelembagaan yang memiliki wewenang pembuatan peraturan terkait perbisnisan. Contohnya perpajakan diperusahaan di tetapkan pemerintahan wajib memikirkan hal perolehan dari perusahaannya serta pemerintahan. Hal-hal perbisnisan ekspor/impor, peraturan dibuatkan pemerintahan semestinya tidakakan memperlambat perusahaannya melaksanakan aktivitas ekspor/impor (Mubyarto, 1993)

Didalam suatu hal-hal kepentingannya perbisnisan, pebisnis negara indonesia sekaligus akan berusan ke politikus. Politikus tersebut merupakan seseorang yang mana telah jadi anggota-dewan perwakilan-rakyat. Setelah di era-reformasi, sehingga tugas dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat menjadi institusi-politik yaitu lembaga-legislasi yang mengalami peningkatan. DPR bukan macan omong seperti pada era soeharto , banyak sekali pelaksanaan bernegars yang harus melewati atau bahkan mendapatkan izin DPR.

Bagi kepentingan perbisnisan, para pebisnis-pebisnis seringkali melaksanakan usaha yang dapat mempengaruhi pada pihak (anggota) DPR. Seringkali melakukan lobi yang dilakukannya kelewatan batasnya salah satunya dengan cara memberi imbalan pada anggotaan Dewan Perwakilan Rakyat itu kasus-kasus menyeret menuju pengadilan karna di tuduh melakukan KKN. Haal-hal itu bisa ada dikarenakan pebisnis-pebisnis ada kepentingan dengan projeknya pemerintahan berusahnya melancarkan perizinan projeknya melalui hal memberi imbalan.

Kampanye antikorupsi adalah sebuah paradoks, dengan inspirasi dan elemen tragis. Di satu sisi, itu hanya mungkin terjadi secara bersamaan kebangkitan gerakan sosial global dan masyarakat sipil yang baru dan bersemangat yang mengartikulasikan bahasa kosmopolitan reformasi politik dan dunia yang lebih baik, paradigma intervensi pembangunan yang berlebihan, menggambarkan seperti halnya kelemahan dalam konsepsi, pengiriman, sumber daya. Orang telah didesak untuk 'memerangi' korupsi, untuk 'memerangi' korupsi sebab dan akibat, untuk mengobarkan 'perang' melawan degradasi sosial dan untuk menggalang di sekitar standar moral integritas dan prinsip. Untuk mengiringi upaya, teknologi lapangan baru, seperti tentara alat dan senjata, telah dirancang dan disebarkan: lokakarya integritas, lokakarya tinjauan sejawat, pengungkapan aset, kode anti-korupsidan praktik terbaik untuk pegawai negeri, pedoman tentang konflik kepentingan (Minogue, 2002).

Sementara itu sektor kebijakan, pembiayaan pembangunan, sangat sensitif terhadap penyalahgunaan korup, di mana pertimbangan anti-korupsi yang dimasukkan ke dalam kebijakan umum sudah lama tertunda. Upaya terbaru untuk menyediakan peningkatan pengawasan kontrak dan bisnis turunan dalam bantuan industri berbagai model 'tambahan' dari transfer kebijakan, pengawasan antikorupsi adalah hubungan yang buruk antara kebijakan dan praktik pembangunan yang umum (Bracking, 2005)

Kepemimpinan Soeharto dahulu sudah melihatkan perusahaan Jepang yang memenangkan penawaran program generator listrik menaklukkan lawannya perusahaan yang

berasal dari Amerika Serikat. Karena aktivitas komunikasi dari Presiden Bill Clinton terhadap Soeharto, alhasil penawaran dilakukan lagi dan yang didapat dua generator listrik diberi dengan adil satu untuk Jepang dan satu untuk Amerika Serikat. Sama juga masalahnya pada saat mempermasalahkan tentang melanjutkan sewa PT Freeport beberapa masa lalu, hingga bagian dari pemerintah AS melakukan aktivitas komunikasi kepada Pemerintah Indonesia agar selalu melanjutkan sewa PT Freeport di wilayah Irian Jaya pada masa itu.

Pelaku politik pun memerlukan fungsi dari pelaku bisnis dalam kegiatan politik yang mereka kerjakan. Partai politik dikawasan mereka berada memerlukan uang untuk melaksanakan program partai politik itu. Keperluan uang yang tinggi bukan hanya dapat ditanggung oleh penyumbang dari dalam partai bahkan untuk menyambut Pileg dan Pilpres. Di dalam masalah ini pemberian yang berasal dari bagian luar amat diperlukan dan kebanyakan yang siap memberikan sumbangan yang besar yaitu para pelaku bisnis yang sangat kaya. Masalah serupa ini memang diperbolehkan sama Undang-Undang serasi dengan peraturan yang resmi dalam UU itu. Pasti saja pemberian dari pelaku bisnis itu mempunyai tujuan supaya kandidat yang mereka dukung berhasil dan kemudian dapat membantu usaha mereka.

Pada zaman Orde Baru, Golkar (pada saat itu bukan Partai Golkar namanya) diketahui mempunyai uang yang sangat banyak. Tidak perlu bingung karena pada zaman itu sangat berimpah usahawan yang berada di sekitar partai Golkar. Dapat dikatakan, Mochtar Ryadi, Sudono Salim, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Probo Suttedjo, Sudwikatmono dll. Yang mempunyai hubungan politik bersama Golongan karya(golkar). Terkait dengan usaha Pilpres 2009. Tiga pasang kandidat presiden melimpahkan dana yang sangat besar untuk

melakukan gerakan. Tiga pasang kandidat memiliki penyumbang tersendiri yang para penyumbang tersebut menginginkan para pasang kandidat itu memenangkan pilpres. pemberian dari instansi serasi dengan peraturan UU Pilpres No. 42/2008 diberikan batas tertinggi 5 milyar setiap instansi.

Jadi, dalam hal ini baik itu pebisnis sekaligus politikus dengan mendapatkan keberhasilan dalam prestasi bisnisnya sebagian pembisnis mulai masuk ke dunia politik. hal ini bersifat mendunia dalam aerti telah ada di berbagai Negara. pada mulanya pebisnis yang lalu masuk kedunia politik Indonesia diawali pada jaman kepemimpinan mantan presiden Soeharto dengan golkar sebagai partai politiknya. Keberhasilan golkar dalam hal tersebut menjadikan banyak pebisnis tertarik untuk menjadi anggota golkar dan lalu menjadi orang politik dengan tokoh golkar yaitu dengan aktivitas bisnisnya tetap terlaksana. Dikenal dengan fahmi idris, aburizal bakrie, jusuf kalla, fadel, mohammad, arifin panigoro, siswono yudhohusodo dan lain lain .

Dapat dikatakan alasan pebisnis memilih dunia politik ialah sebagai berikut:

1. Pebisnis, yang berhasil tentu mempunyai materi yang lebih tapi tidak memiliki kekuatan atau hak didalam Negeranya. Maka menjadikan menjabat di negara mendapatkan 2 aspek sekaligus yaitu uang dan kekayaan.
2. Bisnisnya, terus merosot lalu memulai dengan waktu penuh didalam politik dengan keberhasilan selanjutnya. Mungkin saja fadel mohammad dapat masuk dengan kelompok tersebut dikarenakan sebelumnya jadi gubernur digorontalo, keefektivitasan kelonpok kerjasama batara, di pegangnya tidak terlalu baik.

Sebagian besar pebisnis di Indonesia yang juga orang politik

dapat memenuhi keberhasilan dengan dua ruang yang di jalannya. Setelah jaman reformasi sebagian pebisnis masuk ke dunia politik lalu jadi keanggotaan politics tetapi golongan karya (golkar) tidak, juga pasti jadi prioritas pertama dikarenakan kemungkinan pebisnis tersebut beropini jika golongan karya(golkar) merupakan saat yang sudarh berlalu. Soetrisno. Biasaya para psebisnis terjun ke parpol disambut sukacita melalui partai politik yang terkait. Alasannya tentu saja soal dana. Partai politik memerlukan dana yang sangat banyak untuk menjalankan partai tersebut dan memiliki anggota yan berhasil menjadi pebisnis dapat diharapkan menjadi penyumbang dalam partai.

Ada beberapa tipe pelaku bisnis yang masuk kepolitik lalu mendapat kerja dipolitik yang baik hingga sanggup untuk menjabat sebagai Wakil presiden, Menteri, Ketua Partai Politik, Gubernur, Bupati, dan Ketua Lembaga Tinggi Negara, yaitu :

1. Pelaku bisnis yang masuk ke wilayah perpolitikan sedari awal hingga perpolitikan dan perbisnisannya dikerjakan dengan serentak lalu akhirnya perpolitikannya besar. Jenis tersebut seperti, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Fahmi Idris, Fadel Muhammad, Jusuf Kalla
2. Pelaku bisnis jika masuk kedalam wilayah perpolitikan tuk ikutserta pemilihan kepala daerah pada level prov/kabupaten/kota.

Sebagaimana yang kita ketahui, agar dapat menempati kedudukan sebagai seorang gubernur (Gub), walikota ataupun bupati jadi orang tersebut wajib mendapatkan pendukung yaitu parpol walaupun kini ada peluang tuk jadi calon-calon independent. Maka seseorang pengusaha memiliki kesempatan baik tuk mendapatkan dukungan-dukungan partai-partai politik sadar bahwa pengusaha itu

memiliki modal untuk membiayai pencalonannya dan kampanye. Jelas saja tidak semua pengusaha berhasil menjuarai pilkada namun saat ini tidak sedikit gubernur/bupati/walikota memiliki background pengusaha.

Selanjutnya akan ditampilkan biografi beberapa orang pengusaha yang masuk ke dalam dunia politik sehingga memperoleh sebutan pebisnis yang politikus atau politikus yang juga pebisnis.

Misalnya, Henry Rose Perot, seorang pengusaha Amerika Serikat dari Texas, kota kelahirannya. Karier usahanya diawali saat ia membangun Electronic Data System (EDS) th.1962. Lalu dia menjualkan EDS pada General Motors th.1984 serta membangun Perot System pada th.1988. Hartanya diperkirakan sebanyak USD.5M th.2008 bersumber dari Forbes magazine serta menempatkan posisinya menjadi yang ter-kaya pada peringkat ke-72 di Amerika Serikat.

Selama karier perpolitikannya Ross Perot sempat ikut pemilihan-presiden Amerika Serikat th.1992 menjadi calonan independent, kampanye-nya perot memakan biaya sebanyak USD 65,4juta yang mana uang pribadinya. Saat th.1996,Perot membuat parpol *Reform Party* agendanya nanti dimanfaatkan untuk sarana perpolitikannya di pemilhan presiden Amerika Serikat th.1996. Tetapi faktanya Perot jadi caloon independent serta pollingnya didapatkannya di pemilihan presiden merosot jadi 8% popular vote serta Perot tidak berhasil jadi Presiden Amerika Serikat oleh jaalur independent. Walaupun Perot sangat kaya-raya tapi pada pemilihan presiden Amerika Serikat th.1996 ia mempersilahkan penyumbang untuk menyumbang kampanyenya.

Thaksin Sinawarta. Dilahirkan tgl 26/07/1949 di Chiang Mai.

Sebenarnya karier pertamanya Thaksin ialah jadi seorangan perwira-polisi. Jabatan terakhir ialah letnan colonel kepolisian saat awal pensiun th.1987. Ia telah menjalankan bisnisnya sedari di kepolisian pada business biioskop. Dibangunnya apartemen serta took sutra. Sejak th.1986, dia mengawali karier usahanya dengan membangun Advance Info Service (AIS) dimulai bisnisnya menjadi perusahaan raental computer. Di th.1989 ia membangun Shinawatra.Data.Com yang beroperasi pada data-data networking-service, dan saat ini disebut *Advance Data Network*. Usaha Thaksin lalu mengalami kemajuan yang sangat cepat serta menyentuh berbagai bidang-bidang semacam bisnis-bisnis satelite, telpon seluler, permultimediaan serta perbankan. Lalu ketika berhasil pada bisnisnya kemudain Thaksin masuk dalam perpolitikan. Sejak 1994 dia Palang Dharma Party (PDP). Dia lalu menjabat kepemimpinan PDP serta melewati dipartai tersebut dia menjabat Deputy Perdana Menteri Thailand.

Dikarenakan suatu dan lain halnya Thaksin dengn teman-temannya di 1998 membangun parpol lagi yang disebut Thai-Rak memiliki makna Thai-Cinta-Thai. Di 2010 Thaksin menggapai puncak Karier perpolitikannya saat jadi Perdana Menteri Thailand. Posisi tersebut dijabatnya hingga 2006 pada saat militer merebut kekuasaan Thaksin. Tuduhan-tuduhan diberikan ke Thaksin ialah seperti korupsi-korupsi yang sangat banyak serta akibatnya Thaksin pergi keluar negri agar mengelak dari kepengadilan atas dirinya-sendiri. Masa ini Thaksin pilih menetap di inggris serta tak memiliki keberanian untuk kembali ke-Thailand. Di inggris Thaksin pernah jadi bos sebuah klub sepak bolak 'Manchester City' tapi kemudian ia menjualnya ke sebuah kelompok pengusaha-pegusaha asal arab

Di Indonesia, H. Muhammad Jusuf Kalla yang memulai usaha sejak NV Hadji Kalla *Tranding Company* dibangun oleh ayah nya, H.

Kalla pada 1965 lalu diturunkan padanya. Pada 1968 JK menduduki jabatan Direktur Utama NV Hadji Kalla. NV Hadji Kalla makin meningkat dibawah kepemimpinannya JK dan berkembang diberbagai sektor-sektor dibisnis, saat ini bisnis NV Hadji Kalla meliputi bisnis-bisnis perdagangan-mobil, konstruksi-konstruksi bangunan, kapal-perkapalan, *real-estate*, transport, perternakan udang-udang, iklan-periklanan, kelapa sawit serta dalam hal pertelekomunikasian. JK pula meiliki bisnis-bisnis lain seperti Group Bukaka.

Disiplin ilmu sejatinya tentu tidak dapat berdiri sendiri dan harus terkait dengan berbagai ilmu lain. Seperti ilmu politik yang berkaitan pula dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, hukum, bisnis, ekonomi, dll. Isu tentang perekonomian juga jadi satu isu pilitik ataupun tidak. Dalam agenda pembicaraan pada Pertemuan APEC yang notabennya adalah forum ekonomi juga bebrapa kali memasukkan isu terorisme-terorisme tersebut. Pada kampanye-kampanye calon-calon prsiden, permasalahan perkonomian juga telah jadi permasalahan terpenting didalam kampanye-kampanye perpolitikan dikarenakan masyarakat mengharapkan pemimpinnya kelak sanggup dan memiliki kemampuan peningkatan taraf-taraf hidup dimasyarakat.

Kebijakan ekonomi dari SBY langsung dirasakan oleh masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai atau (BLT), penurunan harga BBM, sekolah gratis dan kredit usaha mandiri merupakan kekuatan SBY yang mana diakui oleh pesaingnya sangat sulit untuk dikalahkan. Untuk para pebisnis-pebisnis, kestabilasan di perpolitikan sangatlah berguna karena banyaknya jumlah intervensi yang ditanamkan. Kestabilasan di perpolitikan tentu menjadi jaminan akan adanya kestabilasan perekonomian.

RANGKUMAN

Isu ekonomi politik telah ditimbulkan oleh ekonomi politik yang menarik garis lurus tindakan politik dengan ekonomi dalam sistem kedaulatan dan sebagai sarana operasi pemerintahan suatu negara serta mencapai kepentingan domestik dan asingnya. Akibat pemerintahan yang agak liberal, eskalasi konflik pasca Orde Baru seakan berputar pada dampak positif dan negatif. Menurut laporan tersebut, dampak positifnya berupa akses masyarakat lokal untuk terlibat dalam pertambangan dan perdagangan, penyebab kerugian ini melibatkan jangka waktu yang lama dan sumber daya fisik dan non fisik yang sangat signifikan, juga diperkirakan kurang berhasil. daripada penilaian manfaat yang diperoleh dari sistem perdagangan timah.

Hadirnya isu ekonomi politik pula memunculkan *power center* yakni bisnis memuat perdagangan dan segala aktivitas komersil yang menguntungkan. Jika di lihat dari pengertian dari kedua aspek, istilah *politics* serta *business* memiliki perbedaan pengertian. *Politics* bermuladaripada suati istilah yaitu “polis” yang di dalam perbahaasaanegara yunani berartikota/negara. Maka jalannya bisnis dapat digerakkan oleh kekuatan politik dan kuatnya suatu kekuasaan

juga dipengaruhi oleh kekuatan bisnis sebagai suatu pondasi dalam mencapai tujuan.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Apa penyebab munculnya isu ekonomi politik menurut Erman ? berikan contohnya !
2. Apa yang dimaksud dengan politik dan bisnis menurut Griffin dan Ebert ? berikan contohnya !

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

Formulir No 2

Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta
- Bracking,, S. (2005), ‘Development Denied: Autocratic militarism in post-election Zimbabwe’, *Review of African Political Economy*, 32, 104/5, 341–57.
- Erman, E. 2010. Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. LIPI Press, Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi XXXVI/No.2/2010.
- Erman, E. 2007. “Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam Politik Lokal di Indonesia”(ed) Nordholt dan Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV
- Griffin,Ricky W. dan Eber,Ronald J. t. 2007. *Bisnis* (diterjemahkan oleh Sita Wardhani), Penerbit Erlangga, Jakarta
- Heriyono.2013.”Ekonomi Politik Dalam Bisnis”.*Jurnal Ekonomi* Vol.1 No.2
- Ibrahim.2013. *Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit ImperiumBudiman, Arief, *Teori*

Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta; Gramedia; 1995

Minogue, M. (2002), 'Power to the People? Good Governance and the Reshaping of the State', in Kothari, U. and Minogue, M. (eds), *Development Theory and Practice*, Basingstoke, Palgrave – now Palgrave Macmillan, pp. 117–35

Mubyarto. 1993. "Ekonomi Pancasila". Jakarta :LP3ES

Mas'ood, Muktar 2002, *New Political Economy dan Perburuan*

Rente, Bahan kuliah ekonomi politik. Malang Unibraw

Pratama, Sandy, 2018. "Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan". *Jurnal Wacana Politik* Vol.3 No.1:40-53

BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memperoleh gambaran tentang politik pemberdayaan
2. Memperoleh gambaran tentang inkubator bisnis

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang politik pemberdayaan dan inkubator bisnis

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab VI dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

6.1. Politik Pemberdayaan

Pendapatan produk domestik bruto negara Indonesia mengalami peningkatan dalam perhitungan kurs Dolar sebesar \$ 857 tahun 2000 meningkat sebesar \$ 3,603 tahun 2016 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pergerakan ekonomi yang cukup lancar khususnya bidang impor dan sebagai anggota organisasi internasional G-20 (Worldbank, 2018). Namun belum melepaskan masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan, hal ini didukung dengan data yang dipublikasi oleh Asian Development Bank masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,6% (adb.org; poverty in Indonesia,2018).

Sebesar 97,64% ribu masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi pekerja di negara Malaysia dan total masyarakat menjadi TKI keluar negeri data tahun 2015 sekitar 275 ribu (Statista.com,2018). Sedikit dari masyarakat Indonesia yang mengiyakan potensi sumber daya alam disekelilingnya, pemerintah masih seolah-olah bergerak sendiri dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dan tingginya tingkat penduduk di Indonesia belum bersinergi secara lurus, kekayaan sumber daya alam yang ada belum dimanfaatkan dengan serius khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Sebagai dampak lain adalah mayoritas masyarakat Indonesia menjadi pekerja, sebagian dalam negeri dan sebagian di luar negeri karena orientasi menuju kepada keuntungan yang didapat dan melihat pekerjaan yang bergantung pada suatu perusahaan sebagai satu-satunya pekerjaan jangka panjang yang menjanjikan.

Perempuan adalah mayoritas orang miskin di dunia (Smee & Woodroffe, 2013: 10). Sementara, menurut data Perempuan adalah

sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan dalam ekonomi dunia (thejakartapost.com,04/08/2016). Politik pemberdayaan yang diterapkan sebenarnya dapat memotivasi masyarakat untuk bergerak, memiliki sikap untuk berinisiatif memberdayakan potensi yang ada. Dalam penelitian ini potensi yang dimaksud peneliti ialah potensi untuk berwirausaha memanfaatkan sumber daya yang ada misalnya masyarakat memulai usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah dapat menyokong pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara dengan membuka kesempatan kerja (worldbank, 20/06/2016). inilah potensi yang dapat dilihat sebagai alat model politik pemberdayaan dalam penelitian ini, keberadaan usaha kecil menengah menjadi jalan tengah menuju kestabilan politik dan ekonomi Indonesia.

Potensi wirausaha merupakan rekombinasi dari sumber daya dan dapat memberikan keuntungan individual (Shane, 2003:18). Namun, wirausahaan lebih luas daripada itu karena tidak hanya memberikan keuntungan individual bagi pelaku usaha namun juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu masyarakat Indonesia dapat memulai kegiatan wirausaha, untuk memulai suatu wirausaha peneliti searah dengan pendapat bahwa pelaku usaha yang baru memulai usahanyaharus menginterpretasikan seluruh informasi yang berhubungan dalam menyusun rencana kerja (Shane, 2003:41-42).

Lebih lanjut, agar dapat mengambil kesempatan potensi wirausaha tersebut pelaku usaha melakukan tindakan yang berkaitan dengan akuisisi dari sumber daya serta komunitas wirausaha baru (Stevenson & Jarillo, 1990: 23). Untuk menarik inti permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, wirausaha sudah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu alat penggerak pertumbuhan ekonomi yang sekaligus membangun sumber daya manusia.

Namun pada faktanya usaha kecil menengah kurang produktif dan terintegrasi global dibanding dengan perusahaan - perusahaan besar, sementara hasil Survei bisnis yang dilakukan International Trade Center menunjukkan hanya 17 persen perusahaan Indonesia yang aktivitas ekspornya dimiliki atau dikelola oleh perempuan (thejakartapost.com,04/08/2016). Hal ini disinyalir karena wirausaha yang sudah ada hanya bersifat sementara, belum ada keseriusan baik dalam pengelolaan maupun peningkatan kapabilitasnya. Peneliti menarik fenomena ini untuk menjelaskan model politik pemberdayaan pada wirausaha tenant sehingga keberadaan wirausaha benar-benar dapat direalisasikan sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Menganalisa sumber mata pencaharian sama artinya mempelajari akar perekonomian masyarakat (Polanyi, 1977: 20). Suasana maupun iklim yang dapat mempengaruhi perkembangan dari politik pemberdayaan ini dimaksudkan seperti menciptakan suasana usaha atau dalam hal ini motivasi persaingan wirausaha. Pada awalnya memahami dan menguasai suasana wirausaha salah satunya ruang lingkup produksi terkadang setelah laju produksi sangat padat diawal usaha kemudian mengalami hambatan dan penurunan aktivitas misalnya tidak memproduksi lagi dan mengeluhkan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kebingungan menghadapi tantangan pemasaran atau menargetkan konsumsi juga menjadi suatu hambatan produksi. Desain Pemasaran mengenai bagaimana cara mendesain untuk keperluan pemasaran, usaha atau usaha pemula umumnya dilakukan secara mandiri mulai dari produksi hingga pemasaran, kemudian muncul keragu-raguan akan kualitas dan respon pasar terhadap hasil produksi yang membuat adanya maju mundur dalam mempromosikan suatu desain. Hal ini

berkaitan dengan kepercayaan terhadap desain pemasaran yang telah dibuat seperti Desain dan Delivery Pelaksanaan Program, atau melaksanakan program-program yang akan dipasarkan.

Jadi menciptakan suasana yang mendukung potensi usaha adalah dengan membangun komunikasi dalam level marketing dan komunikasi di beberapa wilayah yang memiliki ketua sendiri. Maka dari itu pelaku usaha haruslah bergabung menjadi anggota yang tersebar di 90 kota di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan dapat mengkasas cakupan pasar yang lebih luas.

Komunikasi bagaimana seseorang menjelaskan sesuatu atau menyampaikan informasi dalam kalimat yang menarik dan mudah dimengerti sangat penting dalam memasarkan hasil produksi. Minimnya pengetahuan akan teknologi dan informasi tentu dapat menghambat pemasaran dan mengurangi nilai promosi, akan tetapi strategi komunikasi masih dapat dilaksanakan dengan dukungan kerjasama tim yang baik.

Kegiatan pemasaran hasil produksipun menjadi tak terputus atau berkelanjutan yang meskipun akan menimbulkan gesekan atau persaingan di setiap pemasaran. Khususnya pada hasil produksi yang jenisnya sama, ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti keunggulan produk, harga dan kualitas yang akan membedakan setiap produk yang dijual. Meskipun Permasalahan pertama ketika memulai usaha adalah modal awal karena modal usaha itu kecil terlebih usaha jangka pendek ditambah lagi mental yang belum kokoh dan semangat yang masih naik turun menyebabkan adanya kekhawatiran untuk meneruskan usaha, namun membangun kepercayaan diri menjadi sangat penting sebagai pondasi usaha agar terus berjalan, kemudian modal melanjutkan usaha dengan semangat, dan memahami akan adanya untung rugi atau resiko dalam menjalankan usaha sehingga

ketika mengalami naik turun, pelaku usaha tidak akan kehilangan konsentrasi dalam memanajemen usahanya.

Setelah itu, modal dapat ditangani dan pelaku usaha sudah membangun mental dan semangat yang kuat. Masalahnya pun menuju level lain, yaitu SDMnya. Sumber Daya Manusia dibutuhkan dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tidak dapat menjalankannya secara individu karena usaha tersebut harus berkembang yang secara otomatis semakin berkembangnya suatu usaha maka semakin luas pasar untuk dijangkau, semakin meningkat produksi dan tenaga ahli yang dibutuhkan pun meningkat. Permasalahan SDM yang dimaksud adalah masalah keuangan/dana sebagai upah/gaji yang diberikan kepada para pekerja.

Usaha model seperti apa yang dijalankan dan bagaimana usaha dapat memberikan manfaat kepada konsumennya dalam membuka usaha, kendala yang dihadapi dari persiapan manajemen dan marketing dalam dunia usaha terhadap kebutuhan terhadap pembeli karena pembeli dapat dikatakan sebagai sumber yang menghidupi keberlangsungan usaha tersebut, dengan pengertian yang ada maka disinyalir pelaku ekonomi dapat menjual belikan dan merupakan orang yang mempergunakan hasil produksi usaha.

Sebuah model usaha secara virtual disebut sebagai model usaha karena dapat memberikan manfaat kepada konsumennya, dengan mengandalkan tim pelaku usaha dan menarik investor guna mendukung pendanaan usaha. Model usaha merupakan suatu wujud bagaimana usaha dapat memberikan manfaat kepada konsumennya mulai dari tahap awal merencanakan usaha, pemilihan produksi, alat yang dipergunakan, tim hingga ke bagian akhir pemasaran.

Perusahaan pemodelan kanvas, misalnya, adalah teknik manajemen visual yang terdiri dari 9 elemen yang harus dimiliki saat memulai bisnis pemodelan kanvas. ini sebagai berikut: Sembilan

point pokok usaha model kanvas (1). Target pasar; (2).Fungsinya; (3).Channels; (4).Customer; (5).Kedisiplinan; (6). Reset/ STEP; (7).Kegiatan/ Structure; (8).Partnership; (9).Metodel pengeluaran. Lebih lanjut, Identifikasi segmen konsumen yang akan menjadi sasaran perusahaan. Inilah pembagi yang menjadi keunggulan produk, poin-poin yang bisnis memberikan manfaat kepada pelanggan sarannya. Ini adalah kesempatan bagi pelaku wirausaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan keunggulan yang membedakan organisasi mereka dari perusahaan lain, model bisnis yang menyediakan daftar sumber daya yang dapat disiapkan dan dimiliki perusahaan untuk semua bentuk sumber daya, dimulai dengan pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia dan penataan proses organisasi.

Artinya pelaku usaha dituntut untuk selalu fokus dalam berwirausaha dengan target yang sudah ditetapkan atau fokus dengan produk yang diproduksi apakah memenuhi standar dan kebutuhan serta cocok dengan pembeli. Sembilan point pokok usaha model kanvas yang berisi Target pasar, Fungsinya, Channels, Customer, disiplin , Reset/ STEP, Kegiatan/ Structure, Partnership, Dan Metodel pengeluaran. Artinya, ketika berbicara usaha model kanvas secara otomatis yang terlintas adalah tekanan, mendapatkan kepercayaan pembeli yang juga secara langsung ialah melibatkan diri dalam interaksi langsung pada aktivitas pasar sehingga penyampaian produk langsung tepat sasaran.

Selanjutnya adalah jaringan, cara mengkondisikan hasil produksi di era modern ini telah mengusung konsep Online dan offline,

konsep offline bisa dilakukan dengan model penitipan di toko-toko tertentu atau menjualnya di toko sendiri, dengan konsep online hasil produksi dapat dipasarkan dengan *onlineshop* pada intinya produk bisa di jual, cara tersebut berhubungan dengan pembeli melalui media sosial seperti aplikasi *live camp chatting Instagram,Whatsapp* agar bisa aktif berkomunikasi dengan pembeli (online).

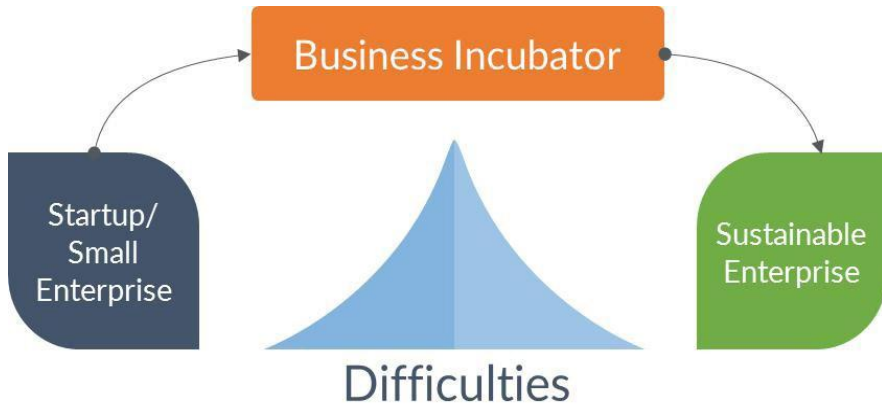
Memahami usaha, pelaku usaha dituntut untuk lebih menGenal tentang pasar dan target produk nantinya baik barang, premium, jasa model atau strategi bagaimana produk dapat terjual dengan harga jual tinggi yang secara otomatis maraup keuntungan lain-lain. Yang perlu di perhtikan adalah target pembeli yang di sasar, mulai dari usia, jenis kelamin,apa yang mereka butuhkan, motif pembelian dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya ialah membaginya kedalam sub-sub kelompok kebutuhan pasar untuk menentukan pola produksi dan pelayanan yang sesuai dengan target. Setelah semua tahap dalam inkubator bisnis dilaksanakan, pelaku usaha mengenali medan pasar yang memuat persaingan wirausaha dan produk-produk yang memiliki potensi menjadi saingan barang atau jasa yang dipasarkan.

6.2. Inkubator Bisnis

Keseimbangan antara pembentukan kegiatan wirausaha tahap awal dan dukungan perusahaan-perusahaan diperlukan melalui perusahaan yang ada dan struktur pendukung. Pengembangan perusahaan pemula sulit untuk dicapai dan ada banyak tantangan awal yang dihadapi oleh upaya tersebut. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, Inkubator Bisnis dapat memantapkan dirinya sebagai jembatan menuju kesuksesan bagi para pemula dan pengusaha. Dengan demikian, Inkubator dapat berfungsi sebagai penghubung penting untuk kesuksesan berkelanjutan pada startup dan perusahaan

kecil pada tahap awal.

Gambar 1
Business Inkubator Bridge



Sumber : Park, Hwi Kwang and Kim,Jay.2016:3

Inkubator Bisnis adalah komponen penting dan vital bagi perkembangan ekonomi kota dan negara di seluruh dunia. Mereka tidak hanya mempromosikan pertumbuhan usaha kecil dan perusahaan, mereka juga berfungsi sebagai kontributor bagi kesehatan ekonomi keseluruhan ekonomi. Promosi usaha kecil melalui inkubator bisnis telah terbukti meningkatkan jumlah pekerjaan, meningkatkan jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui perpajakan, menempati lebih banyak real estat, menambah nilai pada infrastruktur ekonomi masyarakat, dan membantu menciptakan lapangan kerja tambahan di negara lain.

Gambar 2
Business Incubator Development Cycle



Gambar 3
Strategic Marketing snapshot for Business Incubators. Source: authors



Sumber : James and Maria, 2017:36

Adanya manajemen dan staf Inkubator Bisnis untuk mendapatkan persepsi menyeluruh tentang mendorong pemasaran strategis ke depan dalam organisasi mereka.

Tabel. 1 – Pengetahuan tentang Dinamika Industri.
Sumber: kompilasi sendiri.

Q	Sebutkan tiga alasan yang dikaitkan dengan pertumbuhan / penurunan?
•	Alasan terkait pasar / pemasaran termasuk kurangnya strategi pemasaran, Pelanggan miskin
•	dasar, kurangnya inisiatif pemasaran, kurangnya akses pasar,
•	Kurangnya dana termasuk kondisi ekonomi yang buruk dan resesi dan kepercayaan investor
Q	Dence.
•	Kurangnya staf yang terampil termasuk pilihan yang buruk dari inkubasi.
•	Tiga tantangan utama untuk Inkubator Bisnis Anda saat ini?
•	Pendanaan.
Q	Kebijakan pemerintah dan birokrasi.
•	Sumber lebih banyak dana, masalah terkait pemasaran, peninjauan kebijakan pemerintah, lebih banyak Keterlibatan SEDA dan Masalah Internal

Sumber : James and Maria, 2017:25

Elemen Kunci Sukses Inkubator Bisnis (1).Pemilihan manajer yang kompeten dan dinamis, hal ini sangat penting untuk keberhasilan operasi inkubator. Manajer inkubator dalam menarik penyewa yang tepat, membantu penyewa ketika bisnis berkembang, dan menegakkan aturan operasional yang sesuai untuk fasilitas. (2). Kompetensi

individu, manajer inkubator perlu menjadi wirausaha dengan hak individu, karena bertanggung jawab atas inkubator itu sendiri. Dan manajer perlu memiliki keahlian bisnis diperlukan untuk memahami masalah yang dihadapi penyewa, bahkan mungkin sebelum penyewa mengidentifikasi masalah. (3). Akses ke layanan bisnis dan bisnis bantuan di situs incubator (Markley and Namara,1994:2-3) .: Manajer inkubator dapat menjadi jejaring mendorong yang berpengaruh di antara para penyewa dan menjalin kontak antara penyewa inkubator dan perusahaan di luar inkubator.

RANGKUMAN

Adanya pemberdayaan politik dan inkubator bisnis pada wirusaha telah memberikan pengaruh ekonomi politik yaitu kesejahteraan. Melalui politik pemberdayaan untuk menumbuhkan kompetensi kewirausahaan pada wirusaha, referensi praktik terbaik inkubator bisnis industri kreatif yang sukses dan produktif dapat dikumpulkan. Dengan adanya suatu inkubator bisnis industri kreatif wirusaha, pelaku usaha yang menciptakan atau menjalankan usaha baru dengan keterbatasan kemampuan diawal merintis usaha dalam mencari dan menangkap peluang bisnis bisa termediasi dan difasilitasi para pelaku bisnis melalui proses pendampingan, konsultasi, fasilitas, dan bimbingan dalam kegiatan usahanya.

Dengan adanya model inkubator bisnis industri kreatif ini berjalan sinergi dengan politik pemberdayaan yang menjadikan wirusaha lebih kompeten dalam memulai bisnis wirusaha serta meningkatkan prospek perkembangan baik daya tahan maupun daya saing. Sumber daya manusia yang secara sistematis kreatif dan efisien menjadi sumber daya manusia dengan hadirnya inkubator usaha industri kreatif wirusaha, dengan dorongan kompetitif, inovatif, produktif dan kooperatif sebagai langkah awal dalam mewujudkan wirusaha dengan bertumpu pada keunggulan kompetitif dan komparatif serta memberikan visi dan tujuan. Menjaga Kewirausahaan Industri Kreatif.

Pertanyaan

1. Sebut dan Jelaskan apa yang dimaksud potensi wirausaha menurut Shane (2003:18) ?
2. Sebut dan Jelaskan apa yang dimaksud Polanyi (1977: 20) mengenai analisa sumber mata pencaharian dengan ekonomi politik masyarakat ?
3. Sebut dan Jelaskan model Inkubator bisnis yang digambarkan oleh Park, Hwi Kwang and Kim,Jay (2016:3) pada gambar 1 dan 2 ?
4. Sebut dan Jelaskan tahapan dinamika industri menurut James and Maria (2017:25) ?

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :.....
.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara

Paraf Dosen	
-------------	--

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum perkuliahan
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak hadir dalam perkuliahan

Formulir No 2
Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- James, D walter and Maria, P Alexandrina.2017.”Marketing Challenges for south African Public Sector Business Incubator”. Journal of Competitiveness.Vol.9 Issue.4 : 19-39
- Markley,M Deborah & Namara, T Kevin,1994. A Business Incubator: Operating Environment and Measurement of Economic and Fiscal Impacts
- Smee, S. & Woodroffe, J. (2013) “Achieving Gender Equality and Women’s Empowerment in the Post-2015 Framework”. London: GADN. [Online] Available from: <http://www.gadnetwork.org/storage/Achieving%20gender%20equality%20and%20women’s%20empowerment%20in%20the%20post%202015%20framework.pdf> [Accessed: 2014-12-03]

-
- Stevenson, H.H. & J.C. Jarillo (1990), A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, *Strategic Management Journal*, 11, 17-27
- Shane, S. 2003. *A General Theory of Entrepreneurship; The Individual-Opportunity Nexus*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Park, Hwi Kwang and Kim, Jay. 2016. *Manual Of The Korean Business Incubator Model*.
- Polanyi, K. (1977) *The livelihood of man*. Edited by Harry W. Pearson. New York: Academic Press

News :

- Thejakartapost.com. 2016. Empowering women empowering the national economy diambil dari <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/08/04/empowering-women-empowering-the-national-economy.html> pada 12 September 2018
- Worldbank.org. 2018. Indonesian Overview diambil dari <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> pada 12 september 2018
- Statista.com. 2018. Number of Indonesian working abroad by country of destination diambil dari <https://www.statista.com/statistics/702146/number-of-indonesians-working-abroad-by-country-of-destination/> pada 12 September 2018
- Adb.org. 2018. Indonesian Poverty diambil dari <https://www.adb.org/countries/indonesia/poverty> pada 12 September 2018
- Worldbank.org. 2016. Entrepreneurs and small business spur economic growth and create jobs diambil dari <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/20/entrepreneurs->

and-small-businesses-spur-economic-growth-and-create-jobs
pada 12 September 2018.

BAB VII EKONOMI POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pokok bahasan pada bab ini mahasiswa dapat:

1. Memperoleh pemahaman tentang ekonomi politik dalam pendekatan internasional
2. Memperoleh ekonomi politik dalam isu kawasan

Deskripsi Singkat

Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang ekonomi politik dalam ruang lingkup pendekatan yang lebih luas yaitu internasional dan memperoleh ekonomi politik dalam isu kawasan.

Tugas

Mahasiswa harus membaca isi bab VII dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.

7.1. Ekonomi Dalam Politik Internasional

Kajian ekonomi politik tidak hanya seputar aspek politik dan ekonomi, namun melibatkan bidang dan ilmu sosial lain dalam interaksi dan relasinya. Karenanya, ekonomi maupun politik memainkan peran besar untuk ukuran nasional bahkan internasional (Yuniarti,2013:2). Perkembangannya dalam Politik Internasional sejak tahun 1990-an menjadi dominasi isu perekonomian. Hubungan antar negara baik dalam bentuk partipasi maupun pertikaian alasannya cenderung aspek ekonomi dibanding alasan politik.

Pendekatan internasional dalam ekonomi politik ini menggambarkan interaksi saling menguntungkan antar interaksi ekonomi maupun politik yang melibatkan kehidupan masyarakat internasional di berbagai bidang, misalnya budaya, sosial, dan kedaulatan kemana suatu negara lebih cenderung membangun kerjasama. Dilain sisi, politik dapat menentukan suatu susunan kegiatan dan mengarahkannya melayani kepentingan-kepentingan individu kelompok yang berpengaruh, serta kekuasaan yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan menjadi penentu dasar sistem dalam ekonomi. Dari aspek lain, ekonomi dalam prosesnya cenderung menyalurkan kekuatan politik dan aset kepemilikan.

Perekonomian tersebut membuat interaksi kekuasaan antar golongan. Pada kesempatan lain akan memperbaiki sistem politik sekaligus menyusunstruktur ekonomi yang baru.,dinamika hubungan internasional di era modern ini berguna untuk hubungan saling

menguntungkan segi ekonomi serta segi politik (Jones,1993:223-224). Contohnya, adanya larangan ekonomi yang beralasan politis atau sebaliknya kebijakan di keluarkan karena pertimbangan ekonomi. Yakni apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terkaitlarangan ekonomi pada negara Libya, kemudian pada negara Iran dan Irak dengan alasan politis dari pada alasan ekonomi, ketika para pemimpin Negara tersebut tidak menyetujui eksistensi dan mendominasi AS sekitar kawasan di Timur Tengah.

Sekalipun interaksi saling menguntungkan antara politik serta ekonomi, penyebab ekonomi menunjukkan adanya dominasi yang disebabkan aspek politik. Hubungan – hubungan internasional yang dijalin kawasan barat dan timur, Utara dengan Selatan, antar negara maju dan berkembang – Negara miskin, semuanya atas dasar alasan ekonomi. Ekonomi selaku kunci dari status maupun peringkat pada negara pada sistem global. Tanda pembagian dimunculkanberdasarkan kondisi geografis maupun berdasarkan kapasitas dari ekonomi nasional (Yuniarti,2013:5).

Contohnya dapat dilihat dengan apa yang dialami pada Tiga pilar utama Europeanisasi dan globalisasi menjadikan EMU sebagai pembatasan regional baru pada struktur ekonomi politik Jerman. Pertama, pembentukan European Central Bank (ECB) untuk menggantikan Bundesbank di bidang pengelolaan kebijakan ekonomi nasional. Kedua, sebagai bank sentral otonom, ECB memiliki kekuatan untuk mengontrol stabilitas pasar dan strategi kebijakan moneter yang non-akomodatif dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal dan pengupahan yang membentuk kebijakan kesejahteraan Uni Eropa. Ketiga, mengembangkan pedoman luas untuk kebijakan ekonomi yang berfungsi sebagai koordinasi dan peninjauan dan penyediaan ekonomi

perencanaan politik ke Negara Anggota di tingkat Uni Eropa Sebagai pendukung proses regionalisasi Eropa (Dyson, 2005: 127-128).

Tidak hanya di Eropa, tetapi di semua bagian dunia, liberalisme disponsori. Untuk mempercepat Pasar Tunggal Eropa, kebijakan dan peraturan / sistem liberalisasi diperkenalkan secara bersamaan di sektor manufaktur, perbankan dan jasa pada tanggal 1 Januari 1993. Kekuatan ini untuk lebih dari sekadar menyelaraskan 100.000 Peraturan Nasional Jerman (Crouzet, 2001: 235). Perubahan struktur industri pada era globalisasi ini dinakhkodai agar mendorong kemampuan produksi internal serta menambah nilai dari produk tersebut yang bersifat saling berkaitan dan beketergantungan yang menjadi sumber kemakmuran bagi negara-negara di dunia pada system ekonomi global yang memiliki sikap saling bergantung sama lain (Scott, 1985 : 98-99). Dengan metode yang lebih luwes, berbagai macam industri mampu memproduksi barang dengann tepat guna dan dengan relasi yang banyak pelaku industry akan lebih mampu mengatasi berbagai macam dampak yang terjadi di pasar. Mengenai sebaliknya, yang benar disayangkan pada hubungan internasional. Ini merupakan kepincangan jarak Utara dan Selatan. Wilayah-wilayah fakir yang menurut geografis berpengaruh pada bagian bumi selatan memiliki kecanduan yang banyak terhadap wilayah-wilayah modern yang berpengaruh di bagian bumi utara. Saat praktik kapitalisme yang diciptakan wilayah-wilayah Utara, wilayah-wilayah Selatan terhadap wilayah-wilayah Selatan kerap kali berlangsung.

Sedangkan di era 1990-an, rumor perdagangan kerap memerankan rumor perekat ikatan antar Negara, bukan terbatas pula sebagai asal perpecahan. Regionalism yang berkepribadian melindungi dalam bentuk melindungi perdagangan didalamnya

terhadap pasar global biasanya mudarat wilayah yang memerankan mitra bisnisnya. Sementara pasar satu-satunya Eropa berdiri 1993, Amerika Serikat dan Jepang banyak menderita akibat ada berlebihan Kendala bagi mengekspor perlengkapannya menuju pasar perekonomian Eropa. Makin berlebuhnya suatu *trade diversion*(pemindahan wilayah impor) bagi Uni Eropa pun mudarat wilayah-wilayah ASEAN. Besarnya pepecahan bisnisnya yang berlangsung mendampingi wilayah menekankan dibuatnya alat mendunia yang sanggup memenuhi serta mengatasi kesulitan dalam perniagaan internasional (Yuniarti,2013:7).

Pada awal periode 2000-an, sektor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya hubungan kerjasama ekonomi perdagangan untuk mengatasi masalah yang terjadi antara negara-negara di dunia seperti kesenjangan ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi yang memicu masalah kemiskinan yang global. Di sisi lain, bergabungnya Cina dan Rusia sebagai anggota dari WTO pada Desember tahun 2001 dan Agustus tahun 2012 menjadi salah satu moment sejarah dalam dunia politik internasional dan tata dunia kontemporer. Selain Cina, Rusia juga sedang membangun dan melakukan perubahan sistem pada sektor perekonomian dari sistem sosialis menjadi sistem kapitalis (Mansbach & Rafferty, 2008:568).

Dalam beberapa negara, dilihat dari sisi belum kuatnya ekonomi negara tersebut dan dipengaruhi oleh ekonomi dunia, Kemiskinan terjadi di wilayah yang tidak bisa berkompetisi dalam ekonomi perdagangan internasional yang bebas. Walaupun negara-negara telah memberikan bantuan dari segi hubungan bilateral antar negara maupun hubungan hubungan yang multilateral atau melalui forum seperti IBRD, IMF, dan organisasi lain yang ada di PPB untuk membuat forum dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan

percepatan pembangunan negara berkembang mencapai kemajuan dalam negara berkembang dan tingkat ekonomi rendah yang terdapat di kawasan negara-negara Asia bagian Selatan, kawasan Amerika Latin, dan kawasan bagian Selatan Afrika serta kawasan Eropa Timur.

Dengan masuknya negara-negara tersebut dalam sistem ekonomi global akan berpengaruh terhadap kemakmuran ekonomi yang dapat menyebabkan masalah kemiskinan yang tiada ada solusi dan dapat menjadi masalah baru bagi perkenomian dunia di negara-negara berkembang. Proses pendekatan ekonomi yang sudah menetapkan gambaran saling berhubungan dalam kerjasama ataupun perselisihan. Bahkan perselisihan yang timbul bukan dari pola persaingan untuk berlomba merebut sumber-sumber ekonomi yang utama.

Tetapi ada juga ketegangan yang timbul dari ketidakseimbangan antara 'negara maju dan negara berkembang dan miskin dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan yang dapat menjadi bukti nyata dari efek negatif globalisasi ekonomi. Ekonomi secara dunia menegaskan supaya negara-negara lainnya untuk menggambarkan kembali kondisi ekonomi dan politik pada tahun 1990-an dan melakukan peningkatan terhadap persaingan industri. Kondisi ini terjadi secara bersama, dengan adanya pembukaan pusat perbelanjaan dan produksi berbasis baru di kawasan negara berkembang seperti yang berada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sedangkan negara maju terus berusaha membangun sistem jaringan pusat perbelanjaan dan produksi di beberapa kawasan yang baru.

Persaingan mengalami perubahan namun tidak bisa diamati dari peningkatan penanaman modal oleh negara lain secara langsung

terutama pada negara berkembang dan beberapa kawasan di Asia. Tahun 1989 – 1994, penanaman modal oleh negara lain ke negara di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 13.973 juta dollar dan mengalami peningkatan hingga mencapai 30.973 juta dollar pada tahun 1996. Jumlah modal yang ditanam oleh negara lain ke China pada tahun 1989-1994 mencapai 13.951 juta dollar dan mengalami peningkatan mencapai 35.849 juta dollar pada tahun 1995 serta 40.180 juta dollar pada tahun 1996 (Felker, 2003:258).

Polemik selanjutnya, yaitu mengenai apa yang harus dilakukan serta bagaimana menjalankan kebijakan ekonomi (Dyson, 2005: 118). Dyson menyebut pendekatan ini dengan nama ‘pendekatan koalisional’. Menurut dyson, persaingan 3 kelompok besar menghasilkan semangat ekonomi politik Jerman. Adapun 3 kelompok besar itu, yaitu:

1. Kelompok ordo-liberal, keterlibatan negara dalam mengembangkan acuan bagi stabilitas ekonomi dan menciptakan pasar yang kompetitif menjadi hal utama dalam kelompok ini
2. Kelompok kapitalisme terkelola, perlindungan dan kesejahteraan sosial menjadi hal penting dalam kelompok ini.
3. Kelompok neo-keynesian, keterlibatan negara dalam mengelola permintaan untuk meningkatkan perekonomian serta menyediakan lapangan pekerjaan melalui alat-alat fiskal pajak dan mengelola dana belanja publik menjadi hal yang difokuskan di kelompok ini. Persaingan antara 3 kelompok ini semakin terlihat sejak lemahnya pertumbuhan ekonomi Jerman di pertengahan tahun 1980-an serta terjadinya perubahan politik global di awal tahun 1990-an.

Pada masa tersebut, perselisihan mengenai kebijakan ekonomi politik hingga urusan perubahan fungsi dan struktur

negara Jerman yang sangat tepat (Dyson, 2005: 118-120). Terjadinya perselisihan 3 kelompok besar mengenai perubahan struktur ekonomi politik Jerman ini paling tidak menghasilkan 3 momentum besar. Pertama, terjadinya proses penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur dengan melibatkan isu ekonomi dan sosial. Kedua, adaptasi struktur ekonomi politik akibat desakan eksternal dalam proses regionalisasi Eropa. Ketiga, reformasi industrial Jerman akibat tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

7.2. Ekonomi Politik dalam isu kawasan

Dalam era regionalisme ekonomi perlu memperhatikan industrialisasi negara-negara ASEAN yang semakin meningkatkan interdependensi. Yang dimana persaingan dunia akan memenuhi kebutuhan negaranya sudah sangat berlangsung sangat signifikan karena masing-masing negara khususnya ASEAN berlomba-lomba ingin menjadi negara maju yang memiliki industri yang baik sehingga bersaing dengan negara luar yang memiliki industri yang lebih baik.

Seiring dengan semakin saling terkait dan saling tergantung, pergeseran bisnis dan investasi berkorelasi dengan lahirnya aspek baru kawasan ekonomi Asia di Jerman dan negara maju lainnya secara keseluruhan. Uni Eropa dan ASEAN merupakan kawasan organisasi yang paling mengintegrasikan perekonomian secara langsung dan aktif, sehingga batas-batas negara tidak menjadi kendala utama untuk bereaksi terhadap permintaan pasar di negara-negara di kawasan yang masing-masing negara berada dalam satu kawasan.

Politik asia tenggara bersifat kontemporer yang mengikuti perkembangan regionalisme baru yang berkaitan dengan

perkembangan ekonomi.(Breslin dan Higgot, 2003). Pada sektor manufaktur negara-negara ASEAN adalah salah satu sektor-sektor industri yang berhasil meningkatkan nilai ekspor (Ravenhill, 1995: 856). Ekspor barang industri sudah menjadi perhatian khusus bagi negara-negara ASEAN misalnya negara-negara seperti indonesia, thailand yang memberikan lonjakan meningkatnya nilai industri khususnya pada sektor manufaktur karena salah satu di negara di atas memiliki sumber bahan mentah yang banyak diperlukan oleh negara-negara industri terkait untuk membuat produk industri yang bisa di ekspor lagi bagi negara-negara yang membutuhkan barang tersebut, hal ini yang mendorong persaingan di negara-negara ASEAN untuk menjadikan barang industrinya bisa memerikan kepuasan bagi setiap negara yang menggunakan barang ekspornya.

FDI jepang di indonesia berkemban 4200 pada tahun 1989-1992, pada tahun 1986-1989 nilai investasi jepang naik di negara philipina 10800 (Munakata,2006:38). ASEAN, sebagai mesin integrasi ekonomi yang paling aktif, memulai kelanjutan regionalisme ekonomi di Asia. Dalam kerangka ASEAN, inisiasi regionalisme ekonomi dilakukan secara evolusioner, dimulai dengan penerapan AFTA (ASEAN Free Trade Area), skema pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN, dengan tujuan mengidentifikasi batasan untuk lebih mengurangi nilai setiap barang yang masuk saat hal ini tercapai. Akan lebih terealisasi terjadinya pembatasan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Dengan adanya blok Asia Timur ini, tentunya Amerika Serikat merasa kepentingannya di Asia, terutama Jepang dan China semakin tertekan. Dalam membangun kapasitas untuk jejaring ekonomi dalam proses regionalisme di asia negera-negara asia lainnya ikut berkontribusi yang ditakutkan terdapat diplomasi

yang menentukan hubungan ekonomi dan politik Asia. Permainan politik ini akan mengakibatkan permianan harga suatu barang kebutuhan yang kadang naik dan kadang turun yang dimana hal ini dinamakan kebijakan kamu elit dunia di satu sisi berdampak pada kaaum bawah merasa tertindas dengan murahnya harga industri di dalam negeri hubungan seperti ini yang harus di hindari.

Kawasan dengan komposisi penduduk yang lebih besar akan memerlukan kebutuhan yang lebih besar artinya semakin besar jumlahnya penduduknya maka seakin besar keperluan yang dibutuhkan terutama kaitanya dengan perkonomian dunia dimana setiap negara harus siap bersaing demi kepentingan negara kalaulah negara terkendala dengan kebutuhan maka akan terjadi tidak seimbangya anatar kebutuhan dan ketersediaan bahan untuk kepentingan negaranya. Pasar juga tidak kalah penting dalam menyediakan kebutuhan untuk masyarkatnya mulai dari teknologi maupun keperluan kebutuhan sehari-hari.

Negara di dunia bersaing untuk mendapatkan FDI dan industrinya, termasuk sistem jaringan ekonomi Jerman di Asia. Salah satu negara yang bersaing dengan negara lainnya yaitu Jerman. Oleh karena itu, digambarkan dengan jelas adanya perubahan sistem jaringan ekonomi Jerman. Adanya data perubahan modal yang ditanam jerman ke negara lain, industri yang bergabung didalamnya dari berbagai negara dapat digunakan untuk mengetahui sumber kekuatan sistem jaringan ekonomi Jerman di kawasannya.

RANGKUMAN

Melihat ekonomi politik melalui pendekatan internasional tentu tidak akan merubah ketergantungan fungsi antara keduanya, yakni politik dan ekonomi. Aktor utama merupakan negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional dalam mencapai kepentingan negara baik itu melalui kerjasama maupun persaingan ekonomi global yang pada akhirnya mengantarkan negara dengan dominasi terbesar memiliki kekuatan politik yang lebih unggul di mata dunia.

Isu ekonomi politik dalam kawasan sendiri meliputi negara-negara bagian, misalnya kawasan eropa, timur tengah, Asia hingga ke beberapa regional dengan *scoup area* yang lebih kecil. Isu ekonomi politik dalam kawasan membangkitkan rasa kompetitif dari setiap kawasan internasional untuk menunjukkan pengaruh dan keunggulannya dimata dunia, misalnya kawasan Asia yang memiliki kawasan-kawasan tersendiri dengan keunggulan masing-masing meskipun maish terkesan ditunggangi oleh negara maju dalam pergerakan pencapaian kekuatan politiknya.

Keduanya membuktikan bahwa ekonomi sangat berpengaruh pada kekuatan mutlak yang didapatkan suatu negara setelah memiliki dominasi politik, hal tersebut akan berdampak pada perkembangan perekonomian negara yang menciptakan kekuatan ekonomi baru dalam persaingan global dan secara otomatis menarik perhatian

negara-negara lain untuk melihat sebesar apa kekuatan politik yang dimiliki negara dengan dominasi ekonomi politik terbesar di kawasan tersebut. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, dan memudahkan negara kawasan mitra untuk mencapai kepentingan kelompok.

Pertanyaan Kunci/Tugas

Petunjuk:

Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Jelaskan aspek ekonomi politik dalam ukuran nasional dan internasional menurut Yuniarti ? berikan contohnya !
2. Jelaskan konsep kontemporer dalam politik Asia Tenggara sebagai negara kawasan dalam perkembangan regionalisme ekonomi baru menurut Breslin dan Higgot ? Berikan contohnya !

Formulir No 1
Ringkasan Pemahaman Materi

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Tuliskan Pemahaman Saudara	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum perkuliahan
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

Formulir No 2
Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas

Bab :

.....

Nama	:
NIM	:
Program studi	:

Jawablah pertanyaan kunci/tugas	
Paraf Dosen	

Catatan

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Breslin & Higgot. 2003. "New Regionalism in Historical Perspective", *Asia Europe Journal*, Vol. 1 (2) Mei, hlm.167-182.
- Crouzet,Francois.2001. A History of the european economy,1000-2000.Virginia : University Press of Virginia
- Dyson.2005. "Economic Policy Management: Catastrophic Equilibrium, Tipping Points and Crisis Interventions" dalam Simon Green dan William Paterson (eds).2005.Governance in contemporary Germany:The Semi sovereign state revisited Cambridge:Cambridge University Press
- Felker, Greg B. 2003. Southeast Asian Industrialization and the Changing Global Production System, *Third World Quarterly*, April.
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, EkonomiPolitik Internasional, dan Tatanan Dunia*. Jakarta.
- Munakarta,Naoko.2006.Transforming East Asia: The Evolution of Regional Economic Integration.Tokyo:Research Intitute of Economy,Trade and Industry
- Mansbach, Richard W., & Rafferty,Kristen L. . 2008. *Introduction*

to GlobalPolitics. New York: Routledge.

Ravenhill, John. 1995. Economic Cooperation in Southeast Asia: Changing Incentives. *Asian Survey*, Vol. 35. No.9, September.

Scott, Bruce R. 1985. National Strategies: Key to International Competition. Dalam Scott, Bruce dan Lodge, George (ed.). 1985. *US Competitiveness in the world economy*. Boston: Harvard Business School Press.

Yuniarti. 2013. "Pendekatan Ekonomi Dalam Politik Internasional". *Interdependence-Jurnal Hubungan Internasional* Vol.1 No.1.

GLOSARIUM

- Ekonomi politik : Diidentifikasi keterlibatan aspek produksi, keuangan, hingga perdagangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada kasus-kasus keuangan, pendapatan negara, dan seputar perdagangan. Semua faktor tersebut menunjukkan peran utama manusia dalam ekonomi politik sebagai masyarakat dalam suatu negara yang menjalankan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
- ekonomi dan politik : sebuah susunan yang terdiri dari unsur analisis dalam politik dan ekonomi, dimana unsur-unsur tersebut saling memberikan pengaruhnya.
- Pertumbuhan ekonomi : Jika dilihat dari perkembangan ekonomi politik dalam sejarah peradaban dunia sendiri menunjukkan bahwa manusia menggambarkan suatu sejarah berlawanan dalam tingkatan yang didorong oleh persaingan ekonomi, adanya pembagian tata ruang dan aksesibilitas ekonomi dan unit-unit

produksi yang menyebabkan adanya tingkat persaingan pada saat perang dunia I dan II serta berjalannya imperialisme perdagangan bebas.

Pendekatan Ekonomi : upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui sedikit pengorbanan kecil yang dihadapkan pada tuntutan lain dari masyarakat. Pengorbanan dan upaya tersebut dicapai berdasarkan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan menjadi pertimbangan bisnis agar berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, di sisi lain ialah sejauh mana pula kebijaksanaan publik dalam suatu negara yang demokrasi dapat memberikan ruang untuk dapat mengambil keuntungan keberlangsungan bisnis yang dikembangkan.

Teori dependensi :Awalnya, teori ini mengklarifikasi masalah keterbelakangan bekas jajahan Dunia Ketiga dan melihatnya dalam pengertian global melalui pendekatan sistemik yang difokuskan pada ide-ide fundamental Marxisme berbasis materialisme. Hipotesis ini kemudian merupakan produk dari perlambatan pembangunan di Dunia Ketiga dan dipicu oleh faktor internal di kawasan yang bersangkutan.

ekonomi klasik : Operasi barter barang dan jasa yang secara eksklusif ditujukan untuk kekayaan materi dan mendesak hak untuk menegakkan, berdasarkan ketersediaan tenaga kerja dan sumber daya alami. Kerja sama nilainya dengan

Sumber daya dan bahan produksi dasar juga dianggap sebagai modal manusia.

Uni Eropa dan ASEAN: kawasan organisasi yang paling menyatakan dengan tegas dan gencar untuk mengintegrasikan ekonomi agar negara2 yang berada di dalam satu region dimana setiap negara yang berada dalam satu region, batas negara bukan hambatan yang berarti dalam menanggapi permintaan permintaan pasar.

Index

A

Aburizal Bakrie 95
Adam Smith 2, 3, 37, 58
Amerika Serikat 12, 25, 93, 96, 127, 129,
133
Andrain 66, 74
Arief 50, 74, 105
ASEAN 146

B

Biil Clinton 93
borjuis 40
Browet 63, 74

D

Damayanti 10, 18, 65, 66, 67, 70, 74
Deliarnov 4, 18, 43, 50
Dependencia x, 18, 24, 33, 38, 41, 45, 50,
63, 75
DPR 21, 87, 91, 92
Dyson 128, 131, 132, 142

E

Ebert 100
ekonomi klasik 3, 10, 11, 43, 53, 146
ekonomi modern 7, 8
ekonomi politik iii, v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20,
21, 22, 23, 28, 35, 36, 37, 38,
45, 46, 51, 53, 58, 61, 68, 69,
70, 77, 80, 83, 84, 85, 88, 89,
99, 100, 106, 118, 119, 125,
126, 127, 131, 132, 135, 136,
137, 145

eksistensi vii, 10, 11, 13, 127
Engels 2, 3, 14
Erman 78, 83, 100, 105
Eropanisasi 127

F

Foreign Direct Investment 130
Frank 40, 41, 42, 43, 50
fundamental 2

G

Gamble 105
Giddens 6, 18, 105
Golkar 82, 90, 93
Gondwe 54
Griffin 100, 105

H

hegemoni 53
Heriyono 7, 8, 9, 10, 14, 18, 26, 33,
36, 50, 86, 87, 88, 89, 105

hutang luar negeri 61, 62

I

Ilmu politik 36

IMF 61, 62, 129

industri 26, 39, 44, 56, 59, 60, 61,
63, 69, 90, 91, 118, 119, 128,
130, 132, 133, 134

Inggris 2, 20, 28

Internasional vi, xi, 43, 44, 50, 126,
142, 143

K

kapitalis 3, 40, 41, 129

Kapitalis 23, 25

Kepulauan Bangka Belitung 78, 80

kretinisme 40

kuznetz 59

L

Lane 2, 3, 11, 12, 18

liberalisme 90, 128

M

Marx 3, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 39, 105

materialisme 39, 146

Max Weber 18, 105

memonopoli 25

monopoli 5, 25, 41

Mubyarto 22, 25, 29, 33, 90, 91, 106

N

negara iii, vi, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13,
14, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 68, 69, 70, 79, 80,
83, 85, 89, 91, 94, 99, 108,
109, 110, 115, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 145, 146, 147

neoliberalisme 4, 23

Neo-Marxis 39

Nordhaus 20, 21, 29, 33

Nurchahyo 18

O

oikonomike 2

otoriter 42, 54, 66

P

Paul Baran 39

Perancis 20, 28

perang dunia kedua 2

perdagangan internasional 61, 129

policy 2

politics social 89

popular vote 96

Portugis 20, 28

produk domestik bruto 59, 108

produk domestik regional bruto 59

produksi 3, 5, 6, 9, 10, 37, 39, 43, 44,
45, 53, 59, 60, 65, 110, 111, 112,
114, 128, 130, 145, 146

produktivitas 6, 7, 43

produsen 21

R

radikal 6, 23, 41

Robert M McIver 4

Ruslin 9, 18, 23, 33, 39, 41, 42, 43, 50,
61, 62, 64, 75

S

Samuelson 20, 21, 29, 33

Pratama 78, 79, 80, 82, 83, 106

Seymour 37

Siregar 42, 50

sosialis 5, 37, 41, 129

Spanyol 20, 28

Staniland 33

Sukirno 2, 6, 18

Suryadi 22, 33

T

Thaksin Sinawarta 96

Theotonio 39, 42, 43, 46, 50

Todaro 22, 33, 44, 50

U

UU 25, 93, 94

W

wilayah 24, 26, 38, 58, 78, 81, 92, 93, 95,
111, 128, 129, 132

WTO 61, 129

EKONOMI POLITIK

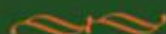
Antara Teori dan Praktek



Dr. A. Razak, SE., MM., Ak., adalah Dosen Politeknik Negeri Pontianak, lahir di Pontianak tanggal 01 September 1962, Pendidikan Sarjana diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak (STIEP), tahun 1994. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang tahun 2000, menyelesaikan S3 di Universitas Brawijaya Malang tahun 2011.



Dr. Elyta, S. Sos, M. Si adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, lahir di Pontianak tanggal 27 Juni 1979, Pendidikan Sarjana diselesaikan di Program Studi Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pada tahun 2001 dengan pujian (cume laude). Pendidikan S2 diselesaikan di Program Studi Ilmu Politik pada Program Magister Ilmu Sosial Tanjungpura tahun 2003, menyelesaikan S3 prodi hubungan internasional konsentrasi ilmu politik di Universitas Padjadjaran tahun 2012 lulus dengan pujian (cume laude).



Segala tindakan dan aktivitas dalam ekonomi politik secara garis besar meliputi aktivitas perdagangan, bisnis, dan pengambilan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan suatu negara. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara, tidak dapat dilepaskan pengaruhnya dengan jalannya suatu negara yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan merupakan kapasitas dalam suatu interaksi sosial, melihat kearifan dan kehidupan ekonomi melalui strategi kedaulatan bermakna memakai strategi ekonomi politik. Negara mempunyai peran untuk menjaga peninggalan kekayaan dan menjaga lingkungan untuk diwarisi ke generasi selanjutnya untuk kenyamanan generasinya dalam urusan ekonomi. Sedang pada sisi konsumsi rumah tangga mereka menikmati hasil yang sudah dibuat dan bagaimana menghasilkan yang maksimal dari hal itu. Hadirnya isu ekonomi politik pula memunculkan power center yakni bisnis memuat perdagangan dan segala aktivitas komersil yang menguntungkan. Jika di lihat dari pengertian dari kedua aspek, istilah politics serta business memiliki perbedaan pengertian. Target khusus untuk mengantisipasi permasalahan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan pada pelaku wirausaha dengan mengembangkan model inkubator bisnis industri kreatif pada wirausaha. Dengan adanya inkubator bisnis industri kreatif wirausaha maka wirausaha yang telah memulai bisnis bisa meningkatkan prospek perkembangan dan daya tahan yang sekaligus memberikan pengaruh pada kondisi ekonomi politik yaitu kesejahteraannya.



Penerbit:

TOP Indonesia

Alamat: Jalan Purnama Agung VII,
Pondok Agung Permata Y35,
Pontianak, Kalimantan Barat
email: topindonesia45@gmail.com
topindonesia45@yahoo.com

ISBN 978-602-5720-18-5



9 786025 720185